



Implikasi Diploması Pertahanan terhadap Keamanan Siber dalam Konteks Politik Keamanan

Implications of Defense Diplomacy on Cybersecurity in Context Security Politics

Lazuardi Loqman Ar Rahman

Program Studi Diploması Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan
E-mail: ardhyofficial@gmail.com

Abstract

The development of global technology and information gave an impact on the increasement of Cyber media users which allow them to connect with each other without any obstacles by using the Internet, this of course presents a new threat to the security of a country. The openness and freedom offered by cyber media makes it difficult for the state to monitor and supervise cyber space which is considered too broad, making cybersecurity a complex topic where actors, motives and targets vary and always evolving every day. Security politics are an inseparable part of this discussion because the use of state security concept is a fundamental component in drafting regulations and policies. This research aims to explain the relation between the complexity of cybersecurity, the role of political security and defense diplomacy. Qualitative method and literature study technique is used in this research. This research uses the assistance of defense diplomacy theory and the concept of national security which serves as a tool to dissect existing problems. From this research, the researcher can conclude that the complexity of cybersecurity encourages political security actors to take responsibility in protecting citizens from various security threats including cyber threats, through defense diplomacy in the form of signing an MoU regarding a Transfer of Knowledge with other countries.

Keyword: Cyber Security; Security Politics; Defense Diplomacy; MoU; Transfer of knowledge



1. Pendahuluan Perkembangan isu keamanan internasional semakin beragam sesudah perang dingin berakhir. Perubahan yang terjadi di lingkungan strategis paska perang dingin disebabkan oleh berbagai faktor penentu, antara lain, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi (ICT). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan arus globalisasi semakin tidak terbendung sehingga secara kasat mata negara telah kehilangan batas - batasnya. Hal ini menyebabkan ketergantungan masyarakat suatu negara terhadap kebutuhan yang berbasiskan teknologi informasi komunikasi.

Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan penurunan biaya terhadap harga yang diperlukan untuk memiliki akses internet. Selain itu persaingan antar penyelenggara jasa internet turut berperan serta dalam menurunkan harga jasa akses internet yang secara tidak langsung mempercepat laju pertumbuhan pengguna internet. Menurut data yang dilansir dari *Internet Worlds Stats*, jumlah pengguna internet di Indonesia per-Mei 2020 tercatat sebanyak 171.260.000 jiwa dari total keseluruhan populasi Indonesia sebesar 273.563.615 jiwa, dengan persentase penetrasi sebesar 62.6% (Internet World Stats, 2020). Hal tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ke-empat sebagai pengguna Internet terbesar di dunia pada Desember 2019 (Internet World Stats, 2019). Hal ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap serangan siber. Menurut data dari PUSOPKAMSINAS BSSN (Pusat Operasi Kemanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara) tercatat ada 88,4 juta serangan siber yang terjadi di Indonesia sejak 1 Januari – 12 April 2020. (Badan Siber dan Sandi Negara, 2020).

Tingkat Penetrasi pengguna internet yang semakin besar di Indonesia juga bisa menjadi *potential disaster* bagi keamanan nasional mengingat saat ini internet menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat seperti berbelanja online, membayar tagihan, mencari informasi, berkomunikasi, serta



menunjang pekerjaan sehari-hari. Walaupun terlihat membawa banyak manfaat secara langsung bagi pemakainya, hal ini tentunya menghadirkan “celah” keamanan yang tidak disadari. Celah keamanan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasinya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Perlu diingat pengguna teknologi siber seluruhnya merupakan bagian dari entitas nyata yang bernama negara dimana mereka memiliki identitas dan berada di dalam suatu wilayah negara. Sehingga segala bentuk ancaman keamanan siber yang menyasar mereka secara individu atau kolektif memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap negara.

Secara global, jenis isu keamanan siber yang populer antara lain adalah DdoS (*Distributed Denial of Service Attack*) dan perang siber, infeksi varian *malware* dan *fraud* masih menjadi penyumbang nomor satu dari jenis ancaman siber yang ada. Indonesia sendiri pernah terkena serangan siber pada bulan Mei 2017 yang lalu, serangan ini sejenis ransomware bernama *WannaCry*. Akibat penyebarannya begitu cepat, sejumlah perangkat komputer di berbagai instansi tidak dapat digunakan (Yusuf, 2017). *WannaCry* menggunakan mekanisme enkripsi data dalam menyandera data korbannya untuk kemudian akan didekripsi setelah si korban membayar sejumlah biaya tebusan melalui bitcoin. Selain Serangan Virus Wanna Cry 2017, Menurut BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Jenis serangan yang paling banyak menyerang Indonesia pada tahun 2020 adalah jenis *trojan activity* sebanyak 56% dan kemudian disusul dengan aktifitas *informationgathering* (pengumpulan informasi) sebanyak 43% dari total keseluruhan serangan, sedangkan 1% sisanya merupakan *web application attack* (Badan Siber dan Sandi Negara, 2020)

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dituntut untuk memahami kondisi *cybersecurity* di Indonesia dan membangun instrumennya guna mengatasi



berbagai ancaman yang datang melalui ruang siber. Selain faktor internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman siber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman Global. Selain itu, Berdasarkan laporan Laporan *Microsoft Security Endpoint Threat* pada 2019 mengungkapkan bahwa kejahatan siber di Indonesia dua kali lipat lebih banyak daripada kejahatan siber yang terjadi dikawasan asia pasifik. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi pertama negara dengan kasus serangan malware tertinggi menyumbang 10,68% dari total kasus serangan siber di asia-pasifik (Firmansyah, 2019).

Keamanan siber menjadi sangat kompleks, hal ini terjadi karena pelaku, motif, cara serta target dari ancaman siber itu sendiri yang sangat beragam dan dinamis. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui empat indikator, antara lain sebagai berikut: (1) Studi Geometripolitica meliputi pembahasan terkait fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil); (2) Pencegahan Kejahatan Siber; (3) Ancaman Siber Global; (4) struktur Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia (Arianto & Anggraini, 2019, p. 13).

Kompleksitas keamanan siber tentunya telah menjadi sebuah isu prioritas setiap negara di dunia pada saat ini. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku *leading sector* Pemerintah RI dalam bidang Telekomunikasi dan Informatika telah memiliki lima agenda kebijakan keamanan siber dalam membangun *Secure Cyber Environment*, melalui penerapan model strategi "*Ends-Ways-Means*" yang fokus pada sasaran, prioritas dan aksi yang terukur. Kelima kebijakan tersebut adalah: *Capacity Building, Policy and Legal Framework, Organizational Structure, Technical and Operational Measures*, dan *International Cooperation* (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).



Negara tentunya tidak akan mungkin dapat membuat perlindungan terhadap dirinya sendiri dalam menghadapi ancaman yang sudah menjadi isu internasional tersebut, untuk itu sesuai dengan lima kebijakan diatas dan juga sebagai salah satu implikasi terkait kehadiran negara dalam menjaga keamanan nasionalnya, tentu Indonesia juga membutuhkan *International cooperation* dengan negara lain dalam bentuk *Transfer of Knowledge* dan *Transfer for technology*, hal ini tentunya bertujuan untuk mempercepat kesiapan dan meningkatkan kualitas keamanan siber Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di ruang siber yang akan terus berkembang setiap harinya. Namun harus diketahui bahwa interaksi ini berkaitan dengan interaksi negara dalam dunia politik internasional. Persoalan ini juga merupakan sesuatu yang kompleks karena berbicara terkait dinamika internasional, *national interest* tiap negara yang akan berkerjasama, dan hubungan antar negara.

Selain itu, istilah *International cooperation* juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari diplomasi pertahanan negara, istilah ini merujuk pada perkembangan yang terjadi, dimana diplomasi diartikan lebih luas dari sekedar aktivitas yang melibatkan hubungan antar negara semata, tetapi juga melibatkan sejumlah aktor seperti organisasi regional dan international, perusahaan multinasional, *sub-national actors*, *advocacy networks*, maupun aktor politik yang memiliki pengaruh saja. Lebih tepatnya, untuk saat ini konsep diplomasi saat ini sudah berbicara terkait ranah kebijakan domestik dan internasional serta sudah masuk ke area politik yang belum dipetakan seperti negosiasi iklim hingga meluas ke dalam isu-isu keamanan siber.

Definisi Diplomasi Siber (*Cyber Security*) menurut Barrinha dan Renard adalah salah satu bentuk dari diplomasi yang dilakukan di ranah atau domain siber, di mana sumber daya, kinerja serta fungsi diplomatik digunakan untuk mengamankan kepentingan nasional terkait dengan dunia maya yang



dilakukan dalam format bilateral maupun multilateral. Dalam hal ini, agenda diplomatik yang menjadi isu utamanya mencakup isu *cyber security*, *cyber-crime*, *confidence-building*, *internet freedom*, dan *internet governance*. Diplomasi pertahanan dibidang siber sendiri dinilai berkembang sangat pesat dalam mendefinisikan dan merangkum upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menyelesaikan jenis konflik baru yang terjadi di dunia maya. Dialog yang dijalankan antar aktor dalam kegiatan diplomasi merupakan salah satu jalan untuk meraih sebuah keuntungan bersama, begitu pula dengan peran utama diplomasi dunia maya yaitu menghasilkan keuntungan melalui dialog tentang masalah keamanan siber itu sendiri (Chotimah, 2019, pp. 118-119). Dari uraian diatas muncul pertanyaan, apa sebenarnya hubungan antara kompleksitas keamanan siber, Peran politik keamanan serta diplomasi pertahanan?

2. Tinjauan Pustaka

Teori Diplomasi Pertahanan

Diplomasi Pertahanan dapat diartikan sebagai negosiasi yang dilakukan antar negara dalam bidang pertahanan guna mewujudkan perdamaian, mencapai kepentingan strategis negara atau kepentingan nasional (national interest, kepentingan ekonomi, perdagangan dan sebagainya (Hidayat, 2014, p. 27). Diplomasi pertahanan sendiri digunakan sebagai alat untuk merealisasikan salah satu kepentingan nasional yaitu keamanan Negara. Gregory Winger menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan suatu cara penggunaan militer bukan untuk kekerasan, seperti pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, latihan militer bersama dalam rangka mencapai kepentingan internasional suatu negara (Sudarsono, Mahroza, & Waluyo, 2018, p. 87).



Konsep Keamanan Nasional

Perkembangan konsep keamanan nasional telah berlangsung sejak perang dingin berakhir, banyak hal baru yang bermunculan dan akhirnya mempengaruhi konsepsi mengenai keamanan nasional. Isu-isu tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, globalisasi, kejahatan siber dan terorisme. Mengacu pada konsep keamanan nasional yang kemudian diartikan berbeda, setiap negara membuat konsep keamanan nasional sebenarnya tidak dapat didefinisikan dengan jelas dan rinci. Konsep keamanan nasional memiliki kunci yakni "Fleksibilitas" yang menjadi alasan kenapa konsep keamanan nasional tidak dapat didefinisikan secara pasti. Kunci ini yang kemudian memudahkan konsep keamanan nasional diterjemahkan oleh setiap negara serta memudahkannya dalam melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi keamanan yang cenderung dinamis (Amaritasari, 2015, pp. 156-163).

Namun secara garis besar Keamanan nasional (*national security*) dapat diartikan sebagai sebuah konsep dimana pemerintahan dalam hal ini eksekutif Bersama-sama dengan parlemen, harus dan wajib melindungi negara dan warga negaranya terhadap berbagai krisis 'nasional' melalui berbagai proyeksi kekuatan, seperti kekuatan politik, diplomasi, kekuatan ekonomi, kemampuan militer, siber, dan lain-lain (Amaritasari, 2015, p. 159).

Penggunaan Teori Diploması Pertahanan Konsep Keamanan Nasional dalam Analisis Kompleksitas Keamanan Siber

Konsep Keamanan nasional ini akan menjelaskan bagaimana Aktor Politik Keamanan mengambil "Tindakan" menggunakan pilihan strategi yang tersedia dalam upaya melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan bagi negara dan warga negaranya di bidang keamanan siber. Sedangkan Teori diplomasi perhanan akan menjadi pilihan strategi yang diambil dalam upaya yang dipilih oleh aktor politik keamanan guna mengatasi kondisi keamanan



siber yang begitu kompleks. strategi diplomasi pertahanan kemudian dipilih dengan pertimbangan dari salah satu karakteristiknya yakni Diplomasi pertahanan sebagai usaha dalam meningkatkan kapasitas pertahanan suatu negara dalam penelitian ini karakteristik tersebut difoskan kepada Pertahanan siber.

3. Metode Penelitian

Jurnal ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah permasalahan dengan seluas-luasnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Dalam jurnal ini peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi pustaka atau telaah pustaka dengan metode deskriptif dari sumber-sumber penelitian sebelumnya maupun data sekunder lainnya. Pustaka-pustaka tersebut berasal dari Jurnal, buku, kajian yang dilakukan instansi pemerintah dan non-pemerintah, dokumen perjanjian internasional, majalah pemerintah, maupun berita-berita online yang masih relevan dengan masalah keamanan siber dan diplomasi siber.

4. Hasil dan Diskusi

Kompleksitas Keamanan siber

Pembahasan mengenai kompleksitas dalam ranah Keamanan Siber suatu negara dapat dijelaskan menggunakan empat indikator antara lain, Sebagai Berikut: (1) Studi Geometripolitik merupakan sebuah pembahasan terkait fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil). Dengan menggunakan konsep Geometripolitika kita akan melihat dunia sebagai



sebuah kekuasaan yang kompleks dan dikelompokkan menjadi delapan matra, yaitu: darat, laut, udara, bawah tanah, siber, galaksi, ruang hampa, dan khatulistiwa. Adapun, suatu proses politik yang “mengikutsertakan” seluruh matra di atas dan membentuk suatu “kekuasaan internasional” disebut dengan istilah “geometripolitik”. Pada awalnya, Kekuasaan hanya di bentuk oleh unsur politik yang dikuasai oleh basis yang berbentuk fisik. Saat ini ada lima basis “kekuasaan” yang terbentuk seiring dengan hadirnya konsep Geometripolitik, basis tersebut antara lain: basis fisik (material), metafisik (metafisikal), psikologik (psikologikal), ideasionik (ideasional), dan geometrik (geometrikal). (Arianto & Anggraini, 2019, pp. 17-18)

Dengan demikian, berangkat dari pengertian Geometripolitik diatas, dapat kita simpulkan bahwa “siber” adalah matra maya yang memiliki ruang yang tak terbatas dan berisikan sekumpulan data elektronik yang tersimpan rapih dan saling terhubung dengan menggunakan jaringan antara satu dengan yang lainnya, dimana dalam fungsinya berperan dalam pembentukan kekuasaan (*Power*). Siber dapat dilihat dan diamati melalui abstraksi lalu lintas data yang terjadi, hal inilah yang kemudian menyebabkan ruang siber adalah sebuah ruang yang tak terbatas dan tak bisa dibatasi termasuk oleh negara dan organisasi, namun ada satu hal yang dapat membatasi kebebasan ruang siber hal ini adalah bagaimana fungsi dari siber itu sendiri dalam memberikan Batasan-batasan dalam melakukan eksplorasi. Dengan demikian walaupun siber dianggap memiliki tidak memiliki sifat yang tidak terbatas, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut ialah “siber merupakan sebuah ruang khusus yang tak terbatas namun akhirnya terbatas dalam perihal memberikan eksplorasi terhadap objek utamanya sendiri” (Arianto & Anggraini, 2019, p. 19)



Pada akhirnya, dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh ruang siber, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa upaya menghadirkan Keamanan Siber adalah upaya dalam menciptakan perlindungan secara geometris dan tak terbatas terhadap segala interaksi yang terjadi didalamnya, hal ini juga dapat berbentuk perlindungan terhadap segala informasi strategis berupa transformasi data aktual menjadi data elektronik yang tersimpan dan saling terkoneksi melalui jaringan sehingga membentuk sebuah lalu lintas informasi, serta menghadirkan perlindungan terhadap kualitas lalu lintas yang terjadi didalamnya. Contohnya adalah: website, dan lain-lain.

Hal ini memberikan ruang siber dikontrol dengan menggunakan regulasi yang dirumuskan secara akurat dan komprehensif dengan melibatkan geometrik militer (Rancangan penggunaan kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global) dan geometrik sipil (perlindungan interaksi sipil di dunia maya). Jika tidak dikelola dengan baik ruang siber akan terus memberikan dampak yang buruk dalam terhadap Indonesia, misalnya pembobolan akun dari nasabah, hal ini menjadi sangat bahaya Ketika berada di tangan orang yang salah, selain pembobolan akun tersebut, penyebaran data pribadi, kejahatan yang terjadi dalam interaksi dalam penggunaan media sosial, serta yang lainnya. (Arianto & Anggraini, 2019, pp. 20-21).

(2) Pencegahan Kejahatan Siber: meningkatkannya lalu lintas informasi secara global yang tidak dapat dibatasi untuk masuk kedalam sistem jaringan komunikasi dan informasi nasional memberikan dampak yang negatif, dimana hal ini menyebabkan kondisi keamanan siber Indonesia berada dalam situasi yang berbahaya dan kritis. Menurut data yang diperoleh dari akamai pada Q1 2020 yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-5 sebagai sumber serangan siber tertinggi di dunia, selain itu ada hal lain yang cukup mengejutkan



yakni persentase peningkatan jumlah serangan siber yang berasal Indonesia pada tahun 2018-2019 berada diangka 243% (Akamai Research, 2020).

Hal diatas tentunya didorong faktor lemahnya keamanan siber di Indonesia. Menurut Hasyim Gautama (Ardiyanti, 2014, p. 100) lemahnya pembangunan infrastruktur siber nasional Indonesia dapat dilihat menggunakan parameter, antara lain sebagai berikut: (a) masih lemahnya pemahaman negara atas keamanan *cyber* yang memerlukan pembatasan layanan yang servernya berada di luar negeri dan diperlukan adanya penggunaan *secured system*, (b) Legalitas penanganan penyerangan di dunia *cyber*, (c) Pola kejadian *cybercrime* sangat cepat sehingga sulit ditangani, (d) Tata kelola kelembagaan *cyber-security* nasional, (e) Rendahnya *awareness* akan adanya ancaman serangan *cyber* internasional yang dapat melumpuhkan infrastruktur vital suatu negara, (f) Masih lemahnya industri kita dalam memproduksi dan mengembangkan perangkat keras atau hardware terkait dengan teknologi informasi yang merupakan celah yang dapat memperlemah pertahanan dalam dunia *cyber* dan yang terakhir belum tersedianya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait isu Kejahatan Siber dan penanganan Kejahatan Siber (Arianto & Anggraini, 2019, p. 23)

(3) Ancaman Siber Global: Terdapat fakta yang cukup membuat khawatir terkait begitu besarnya kerugian serangan siber yang menyerang Indonesia, menurut data yang diperoleh dari *CIA World Factbook* menyebutkan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan siber Indonesia menyumbang 1,20% yakni sebesar 895 Milyar Dollar Amerika dari total kerugian serangan siber secara global yaitu 71.620 Milyar Dollar Amerika.



	Global	Indonesia
GDP:*	USD 71, 620bn	USD 895bn
Per cent of global GDP*:		1,20%
Cost of:**		
Genuine cybercrime:	USD 3,457m	USD 43m
Transitional cybercrime:	USD 46,600m	USD 582m
Cybercriminal infrastruc- ture:	USD 24,840m	USD 310m
Traditional crimes be- coming cyber:	USD 150,200m	USD 2,748m

Tabel 1. Perkiraan Kerugian dari Kejahatan Siber: Global dan Indonesia. Sumber: Meeting the cyber-security challenge in Indonesia an analysis of threats and responses A report from DAKA advisory (2013), Hal 21, diakses pada 30 September 2020

Contohnya lainya dari ancaman siber Global ialah penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini menjadi perhatian karena kegagalan Indonesia mendeteksi Penyadapan terhadap pemimpin negara, dimana kasus ini baru diketahui setelah mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat yang bernama whistleblower Edward Snowden membocorkan dokumen penyadapan tersebut ke publik pada 2013. Dalam dokumen yang dibocorkan oleh Snowden tertulis bahwa intelijen elektronik Australia (*Defence Signals Directorate/DSD*) melacak kegiatan SBY melalui telepon genggamnya, Nokia, selama lima belas hari pada Agustus 2009 (RIZ, 2013)

(4) struktur Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia: Sejalan dengan perkembangan industri 4.0 yang berfokus pada “digitalisasi” dunia tentu membawa ancaman yang semakin kompleks kepada keamanan siber, hal ini



kemudian melahirkan wacana untuk membentuk matra baru yakni Angkatan siber yang sebagai bentuk peningkatan pertahanan maya (*Cyber Defence*) dalam mengantisipasi *Cyber Attack* dan *Cyber War*. Hal ini tentunya harus disikapi dengan serius karena akan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mengembangkan serta meningkatkan kapasitas sistem pertahanan dan keamanan siber yang mempuni. Selain Permasalahan pembentukan matra baru yang masuk kedalam ranah struktual, Indonesia juga memiliki tantangan lainnya yakni kebijakan terkait perthanan dan keamanan siber di Indonesia, ini tentunya harus menjadi tanggung jawab para *Stakeholder* untuk menghadirkan regulasi yang tepat serta meningkatkan upaya sinergisitas antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam upaya membuat dan mengimplementasikan program yang telah di rancang sebelumnya dengan tujuan melindungi infrastruktur telekomonikasi dan siber.

Politik Keamanan

Seiring dengan berakhirnya perang dingin, kajian dalam bidang politik keamanan menjadi lebih luas, awalnya kajian politik keamanan hanya terbatas pada keamanan dalam bidang militer saja, dimana pemerintah menganggap bahwa keamanan nasional hanya mengandalkan militer untuk bertahan dari ancaman serangan militer negara lain (Pojok Wacana, 2020). Menurut Buzan dalam karyanya yang berjudul "*Rethinking Security after the Cold War (1997)*" ia memberikan penjelasan setidaknya ada tiga fokus utama politik keamanan pasca perang dingin berakhir antara lain *Tradisionalist*, *Widening* dan *Security Study*. Ketika perang menggunakan *Hard Power* sudah tidak semasif sebelumnya, munculah perluasan pemikiran terkait dengan kerangka keamanan yang mencakup isu-isu non-militer yang dikenal dengan istilah *Widening*, yang terakhir ialah *Security Study* dimana ini merupakan perluasan dari perdebatan yang terjadi antara *Tradisionalist* (menganggap bahwa isu keamanan berfokus



pada bidang militer saja) dengan *Widening* (Menganggap bahwa isu keamanan tidak hanya dari sektor militer melainkan juga terdiri dari sektor-sektor lainnya). Dalam sudut pandang *Security Study* isu keamanan dianggap sebagai sebuah bentuk dari "Politisasi", karena sebuah isu yang awalnya tidak mendapatkan perhatian akan dianggap sebagai isu serius ketika pejabat publik, tokoh Masyarakat dan tokoh intelektual sudah menjadikan isu tersebut perbincangan. Kata kunci dari pengertian diatas adalah "*securitization = politicization or institutionalized*", dimana secara singkat sebenarnya isu-isu keamanan yang awalnya bukan merupakan fokus kebijakan dari pemerintah bisa menjadi fokus pembahasan ketika isu tersebut mendapatkan perhatian publik yang besar, dalam situasi ini pemerintah terkesan "mempolitisasi" isu tersebut dengan menjadikannya masuk kedalam katagori ancaman yang eksistensial sehingga pemerintah memiliki *Previllage* mengeluarkan kebijakan sebagai langkah prosedural dari sebuah sistem politik (Buzan, 1997, pp. 13-15).

Lebih jauh lagi, untuk dapat memahami definisi politik keamanan bisa dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap narasi Politik yang ada dalam memberikan pengaruh di bidang keamanan. Hal tersebut dapat diamati dengan cara melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah terkait keamanan. Menurut Caveltly dan Wenger politik keamanan tentunya berkaitan erat dengan masalah otoritas dan kekuasaan dalam bidang pertahanan. Meskipun demikian, negara bukanlah aktor tunggal dalam pembahasan ini, melainkan ada persimpangan antara aktor negara dan non-negara baik secara nasional maupun Internasional. Penting juga bagi semua untuk memahami bahwa peran dari setiap negara dalam urusan keamanan siber itu berbeda-beda, ada negara yang berperan sebagai penjamin keamanan, legislator, regulator, hingga menjadi aktor ancaman dan bahaya bagi masyarakat dan negara lain. Sehingga politik keamanan sangat bergantung terhadap proses negoisasi yang



jelas antara seluruh aktor yang terlibat didalamnya untuk membahas batas tanggung jawab, kesepakatan, atau ketidaksepakatan atas Tindakan yang diambil. (Cavelty & Wenger, 2019, pp. 2-4).

Implikasi Diplomasi Pertahanan terkait Permasalahan Keamanan Siber Nasional

(1) Kerjasama keamanan siber Indonesia dengan negara-negara ASEAN

Pada KTT ASEAN yang ke-32 yang berlangsung pada tanggal 27-28 April 2018 di Singapura, para pemimpin ASEAN menandatangani nota kesepakatan Kerjasama dibidang keamanan siber. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan *ASEAN ICT dan Cybersecurity* pada agenda KTT Menteri ASEAN ke-2 yang membahas Keamanan Siber (AMCC) pada tanggal 18 September 2017 di Singapura. Adapun kesepakatan tersebut meliputi: kerja sama dibidang keamanan siber dalam upaya peningkatan kapasitas masing-masing negara, termasuk penegakan hukum dari tindak kejahatan siber dan pelaksanaan program pelatihan tentang keamanan siber melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, *ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers' Meeting (TELMIN)*, *AMCC*, *ASEAN Cyber Capacity Programme*, *ASEAN Regional Forum (ARF)* terkait Keamanan ICT serta pertemuan para ahli keamanan siber dari anggota *ADMM-Plus (Association of Southeast Asian Nations, 2018)*

(2) Kerjasama Keamanan Siber Indonesia dengan Inggris

Pada 14 Agustus 2018, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pemerintah Inggris terkait Kerjasama dibidang keamanan siber (*cyber security*). Adapun kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* tersebut meliputi:



(a) Implementasi dan Pengembangan Strategi Keamanan Siber Nasional; (b) Pengelolaan Insiden Siber; (c) Penegakkan hukum Kejahatan Siber, dengan metode *Join Exercise* dibidang penguatan *cyber forensic*; (d) Pelatihan dan Kampanye Kesadaran Keamanan Siber; (e) Peningkatan Kapasitas dibidang riset dan pertukaran akademis industri Siber (Badan Siber dan Sandi Negara, 2018)

(3) Kerjasama Keamanan Siber Indonesia dengan Australia

Pada 31 Agustus 2018, dalam agenda *3rd Cyber Policy Dialogue* antara pemerintah Indonesia diwakili oleh kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan Pemerintah Australia yang pada saat itu diwakili oleh perwakilan Pusat Keamanan Siber Australia. Kedua negara setuju untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan pemerintah Australia dibidang keamanan siber. Adapun kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian tersebut meliputi bidang (Kementerian Luar Negeri, 2018): Peningkatan Kapasitas dan penguatan Koneksi, Ekonomi Digital, serta Kejahatan Siber .

(4) Kerjasama Keamanan Siber Indonesia dengan Amerika

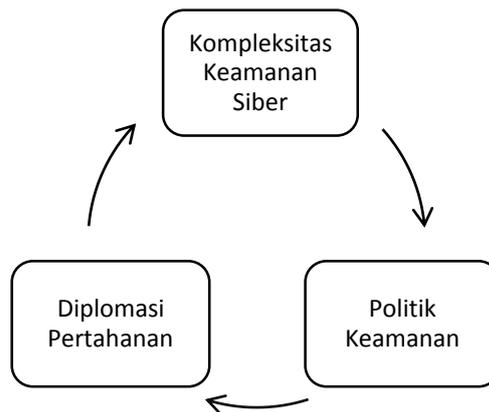
Pada 28 September 2018 pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia sepakat untuk menandatangani *Letter of Intent on Promoting Strong Cyber Space Cooperation*. *Letter of Intent* tersebut merupakan implementasi dari keseriusan dua negara untuk berkomitmen dalam meningkatkan kerja sama di dunia siber yang sebelumnya sudah disepakati dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo ke Amerika Serikat pada Oktober 2015 lalu.



Letter of Intent yang disepakati tersebut menjadi kerangka acuan kerja guna memajukan dan menguatkan kerja sama serta meningkatkan pengembangan kapasitas dunia maya nasional dan yang terpenting ialah memberdayakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk sebagai *focal point* Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas keamanan siber. Dalam *Letter of Intent* ini ada beberapa bidang kerja sama yang ditonjolkan, antara lain: pembahasan pengembangan strategi siber nasional; kemampuan manajemen insiden nasional; pengembangan kapasitas dan kerja sama dalam melawan kejahatan dunia maya; dan meningkatkan kesadaran keamanan dunia maya, dan yang terakhir kedua negara sepakat akan mengerjakan rencana aksi untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kegiatan konkret yang ada dalam *Letter of Intent* (U.S. Embassy & Consulates, 2018)

Hubungan antara Keamanan Siber, Politik Keamanan dan Diplomasi Pertahanan

Untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan antara Keamanan siber, politik keamanan dan diplomasi pertahanan dapat kita lihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1. Hubungan antara keamanan siber, Politik Keamanan dan Diplomasi



Dari bagan disamping, dapat diartikan bahwa kompleksitas dalam pembahasan isu keamanan siber terkait ancaman dan gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, telah menuntut pemangku kepentingan yaitu aktor dalam politik keamanan (pemerintah) menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep dari keamanan nasional yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat melindungi negara dan warga negaranya terhadap berbagai krisis 'nasional' melalui berbagai proyeksi tak terkecuali dibidang siber. Dengan menggunakan konsep keamanan nasional, analisis terkait "action" dari aktor politik keamanan tentunya menghadirkan beberapa pilihan strategi, salah satunya adalah diplomasi. Dalam kasus ini peneliti memilih strategi diplomasi pertahanan sebagai salah satu bentuk implementasi konsep keamanan nasional. Pembangunan infrastruktur siber Indonesia yang dinilai masih lambat menjadi menjadi latar belakang terpilihnya strategi terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas keamanan siber Indonesia. Bentuk diplomasi yang dipilih pemerintah antara lain penandatanganan MoU dan *Letter of Intent* dengan negara lain seperti Australia, Amerika serikat dan Inggris yang diharapkan menjadi media *Transfer of Knowledge* (TOK) bagi Indonesia.

5. Kesimpulan

Perkembangan serta kemajuan teknologi informasi serta komunikasi telah membuat ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara semakin beragam, Ancaman keamanan yang awalnya hanya dalam bentuk militer berevolusi menjadi siber. Perubahan ancaman ini tentunya membuat Indonesia harus segera mengikuti perkembangan yang dunia siber yang cenderung dinamis. Permasalahan terkait Kombinasi dari motif, cara dan target serangan siber membuat keamanan siber menjadi hal yang dinilai sangat kompleks dimana serangan siber bisa terjadi sewaktu-waktu dalam bentuk yang



sebelumnya belum pernah ada. Belajar dari kasus serangan siber dalam bentuk Virus WannaCry yang terjadi pada tahun 2017 dan penyadapan telepon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharuskan Pemerintah selaku aktor dalam bidang politik keamanan untuk mampu membuat kebijakan sesuai dengan konsep keamanan nasional yang menjamin hadirnya rasa aman bagi negara dan warga negara terlepas ancaman dan gangguan yang setiap hari mengintai dan dapat membuat kerugian baik secara materil maupun immateril.

Upaya peningkatan kapasitas keamanan siber Indonesia tentunya tidak dapat dilakukan sendiri melainkan juga membutuhkan adanya Kerjasama dengan negara lain (diplomasi pertahanan dalam bidang keamanan siber) terutama negara-negara yang memiliki keamanan siber yang mumpuni. Dengan menggunakan konsep keamanan nasional, kegiatan dinilai sebagai upaya aktor politik untuk terlibat dalam “*action*” dalam menjalankan strategi serta upaya menghadirkan keamanan siber di Indonesia, salah satu pilihan terbaik ialah diplomasi. Mengapa kemudian diplomasi dipilih, Karena dalam Diplomasi pertahanan ada satu Karakteristik utamanya yang menjelaskan bahwa fungsi dari diplomasi pertahanan ialah “Upaya atau usaha negara dalam meningkatkan kapasitas pertahanannya”. Sehingga dengan berdiplomasi di bidang keamanan siber, negara telah melakukan peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan sibernya dalam bentuk *transfer of knowledge* dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama siber bersama beberapa negara antara lain ialah dengan negara-negara ASEAN, Australia, Inggris, dan Amerika.

Daftar Pustaka

Artikel



Firmansyah, L. M. (2019, Juli 1). *Indonesia jadi Negara dengan Serangan Siber Tertinggi*. Retrieved September 25, 2020, from Lokadata: <https://lokadata.id/artikel/indonesia-jadi-negara-dengan-serangan-siber-tertinggi>

Pojok Wacana. (2020). *Tiga Pendekatan Utama dalam Kajian Politik Keamanan*. Retrieved September 20, 2020, from <http://www.pojokwacana.com/tiga-pendekatan-utama-dalam-kajian-politik-keamanan/>

RIZ. (2013). *Snowden: Ponsel SBY Disadap Australia*. Retrieved September 30, 2020, from <https://www.liputan6.com/global/read/748895/snowden-ponsel-sby-disadap-australia>

Yusuf, O. (2017, Mei 15). *Kronologi Serangan Ransomware WannaCry yang Bikin Heboh Internet*. Retrieved September 25, 2020, from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com/read/2017/05/15/09095437/kronologi.serangan.ransomware.wannacry.yang.bikin.heboh.internet?page=all>

Buku

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Tentang Keamanan Siber*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Jurnal

Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-173.

Ardiyanti, H. (2014). Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. *Politica*, 5(1), 95-110.

Arianto, A. R., & Anggraini, G. (2019). Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 13-29.



- Buzan, B. (1997). Rethinking Security after the Cold War. *Cooperation and Conflict*, 32(1), 5-28.
- Cavelty, M. D., & Wenger, A. (2019). Cyber security meets security politics: Complex. *Contemporary Security Policy*, 1-28.
- Chotimah, H. C. (2019). Tata Kelola Keamanan Siber dan Diploması Siber Indonesia. *Jurnal Politica*, 2(10), 113-128.
- Hidayat, S. (2014). Diploması Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 25-52.
- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & Waluyo, S. D. (2018). Diploması Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 83-102.

Konfrensi

- Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*. Wina: Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Website

- Akamai Research. (2020). *State of The Internet/ Security Reports*. Retrieved September 30, 2020, from <https://www.akamai.com/us/en/resources/our-thinking/state-of-the-internet-report/global-state-of-the-internet-security-ddos-attack-reports.jsp>
- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-173.
- Ardiyanti, H. (2014). Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. *Politica*, 5(1), 95-110.
- Arianto, A. R., & Anggraini, G. (2019). Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 13-29.
- Association of Southeast Asian Nations. (2018). *ASEAN Leaders' Statement on Cybersecurity Cooperation*. Retrieved September 30, 2020, from <https://asean.org/asean-leaders-statement-on-cybersecurity-cooperation/>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2018). *BSSN Tandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama di Bidang Keamanan Siber Dengan Pemerintah Inggris Raya*. Retrieved September 30, 2020, from <https://bssn.go.id/bssn-tandatangani-nota-kesepahaman-kerjasama-di-bidang-keamanan-siber-dengan-pemerintah-inggris-raya/>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2020, April 20). *Rekap Serangan Siber (Januari – April 2020)*. Retrieved September 25, 2020, from [bssn.go.id: https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/](https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/)
- Buzan, B. (1997). Rethinking Security after the Cold War. *Cooperation and Conflict*, 32(1), 5-28.



- Cavelty, M. D., & Wenger, A. (2019). Cyber security meets security politics: Complex. *Contemporary Security Policy*, 1-28.
- Chotimah, H. C. (2019). Tata Kelola Keamanan Siber dan Diploması Siber Indonesia. *Jurnal Politika*, 2(10), 113-128.
- Firmansyah, L. M. (2019, Juli 1). *Indonesia jadi Negara dengan Serangan Siber Tertinggi*. Retrieved September 25, 2020, from Lokadata: <https://lokadata.id/artikel/indonesia-jadi-negara-dengan-serangan-siber-tertinggi>
- Hidayat, S. (2014). Diploması Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 25-52.
- Internet World Stats. (2019, Desember 31). *Internet World Stat*. Retrieved September 24, 2020, from www.internetworldstats.com: <https://www.internetworldstats.com/top20.htm>
- Internet World Stats. (2020, Juli 26). *Internet World Stats*. Retrieved September 24, 2020, from internetworldstats.com: <https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>
- Kementrian Luar Negeri. (2018, Agustus 31). *Treaty Kementrian Luar Negeri*. Retrieved September 30, 2020, from <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0240.pdf>
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Tentang Keamanan Siber*. Jakarta: Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.
- Pojok Wacana. (2020). *Tiga Pendekatan Utama dalam Kajian Politik Keamanan*. Retrieved September 20, 2020, from <http://www.pojokwacana.com/tiga-pendekatan-utama-dalam-kajian-politik-keamanan/>
- RIZ. (2013). *Snowden: Ponsel SBY Disadap Australia*. Retrieved September 30, 2020, from <https://www.liputan6.com/global/read/748895/snowden-ponsel-sby-disadap-australia>
- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & Waluyo, S. D. (2018). Diploması Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 83-102.
- U.S. Embassy & Consulates. (2018). *Republic of Indonesia and the United States of America Sign a Letter of Intent on Promoting Strong Cyber Space Cooperation*. Retrieved September 30, 2020, from <https://id.usembassy.gov/republic-of-indonesia-and-the-united-states-of-america-sign-a-letter-of-intent-on-promoting-strong-cyber-space-cooperation/>
- Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*. Wina: Institut für die Wissenschaften vom Menschen.



PENGARUH INTERAKSI ANTAR NEGARA ASEAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI

I Putu Astika

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan
E-mail: (iputuastika@gmail.com)

Abstract

Current global and regional conditions have an influence on policies so that in conducting interactions between countries, they will relate to the surrounding countries. Countries in the Southeast Asian region as in ASEAN have the same foundation in achieving their national interests so that it will affect the interactions that occur in this era of information technology. This aim is not solely done to create mutual trust, but to prevent conflicts and disputes. The development of information technology will certainly affect state interactions so that the state in achieving its interests must be based on existing interactions. Countries in ASEAN have relationships and interactions that exist within them, be it in the economic, social, cultural, educational and even political fields. The purpose of this research is to study, know and analyze the influence of interaction between ASEAN countries in the Information Technology Age. This research method uses qualitative research methods with descriptive analytical research type so that the authors participate in analyzing the problems that occur. The results of this study indicate that there is an influence of interaction that exists between ASEAN countries in the Information Technology Age so that in achieving their interests, ASEAN countries interact in these various fields.

Keywords : Policy, ASEAN, Information Technology, State Actors, Interests



1. Pendahuluan

Interaksi antar negara dilakukan tidak semata-mata untuk menjalin hubungan baik antara negara di kawasan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut sehingga dalam menjalankan interaksinya negara dilandasi oleh kepentingan nasionalnya. Dalam mencapai kepentingan tersebut, negara akan mempertahankan statusnya sebagai negara yang berdaulat serta merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana halnya dengan negara-negara lainnya di dunia ini (Hidayat, 2018). Hal ini sesuai dengan landasan dalam negara ASEAN yang ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai. Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Tenggara memiliki peran yang penting dalam menjaga kepentingannya baik secara geostrategi dan geopolitik. Dengan demikian, ASEAN secara umum memiliki kesatuan geografis yang terdiri dari darat, perairan, dan udara dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan sejarah, perjanjian, dan/atau konvensi internasional sehingga dalam interaksi dan hubungannya memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya (Hidayat, 2018).

Negara di kawasan Asia Tenggara memiliki tujuan dalam interaksinya sehingga dalam memaksimalkan potensinya akan berhubungan dengan menjaga keselamatan segenap masyarakatnya agar terhindar dari ancaman baik yang datang dari manusia maupun dari alam (Iriawan, 2020). Hal ini akan berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi dalam interaksi negaranya. Negara tidak semata-mata melakukan interaksinya berdasarkan kepentingannya, tetapi turut mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi. Pengaruh dalam perkembangan teknologi dan informasi akan



berhubungan dengan interaksi yang dilakukan oleh setiap negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang yang dikaji baik dalam ekonomi, social, politik, pendidikan dan kebudayaan yang berpengaruh erat hubungan dengan perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan penulisan diatas bahwa dalam melakukan interaksi antar negara memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasional negara tersebut. Hal ini diperkuat dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat sehingga dalam melakukan interaksinya negara lebih luas dalam memberikan pengaruhnya. Pengaruh ini tentu akan berhubungan dengan kebijakan negara tersebut dalam melakukan interaksi sehingga negara dalam melakukan interaksinya dilandaskan atas kepentingan yang ingin dicapai. Negara di kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai kepentingan yang akan dicapai sehingga dalam melakukan interaksinya tidak terlepas dari kebijakan yang ada berdasarkan negara tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengambilan Kebijakan

Pengambilan kebijakan yang diperoleh negara merupakan faktor keberhasilan bersama dalam mencapai kepentingan bersama. Permasalahan yang seringkali terjadi terkait lemahnya strategi dalam mengambil kebijakan adalah terbenturnya kepentingan pemangku kepentingan yang satu dengan yang lainnya sehingga mengakibatkan ketidakjelasan misi dan visi bersama. Pengambilan kebijakan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi suatu negara, karena akan berhubungan dengan masa depan negara tersebut (Muhdi Muhdi 2017).



Unsur utama dalam proses pengambilan kebijakan adalah untuk menyelesaikan problema atau masalah. Masalah harus segera dituntaskan melalui pengambilan kebijakan. Pada umumnya, kegagalan negara cenderung berhubungan dengan ketidakmampuan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Masalah hanya sekadar diartikan sebagai penderitaan atau kesulitan belaka. Namun suatu penderitaan belum tentu masalah. Masalah lebih berarti sebagai bentuk penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang telah kita rencanakan dan kita prediksi. Masalah itulah yang menjadi langkah dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan kerangka pengambilan kebijakan, suatu negara harus mengetahui posisinya untuk dapat mencapai kepentingan yang ingin dicapai.

2.2 Kepentingan Nasional

Negara dalam mencapai tujuannya berlandaskan sesuai dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan kekuatan negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*) (Rachman 2018). Ketika kepentingan nasional digunakan untuk mengejar kekuatan dan kekuatan yang dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki—kecuali kekuasaannya sendiri—adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang.

Kepentingan nasional negara yang bersifat egois dan agresif tergantikan dengan kepentingan yang bersifat individualis sekaligus altruistik dan persuasif yang nondestruktif (*soft power*). Konsekuensi yang diakibatkan oleh sifat egois dan agresif adalah keberadaan diplomasi *soft power* yang memunculkan ragam diplomasi yang mempengaruhi dalam wacana kepentingan nasional realisme mulai kembali kepermukaan secara perlahan meskipun harus jalan seiringan



dengan *soft power* (Burchill 2005). Dengan demikian, dalam menjalankan kepentingannya negara di kawasan Asia Tenggara menjalankan pengaruhnya berdasarkan diplomasi yang dilakukannya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena jenis penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian tertentu (Moleong 2008). Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka (Moleong 2008). Fungsi dari penelitian deskriptif ini peneliti akan berbicara tentang gambaran penjelasan sebuah fenomena atas kenyataan sosial, mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Dengan penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan penjelasan atas fenomena yang terjadi. Tetapi peneliti turut memberikan analisis dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, peneliti turut menjelaskan fenomena yang marak terjadi dengan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

4. Hasil dan Diskusi

Perkembangan teknologi dan informasi di Era ini memiliki pengaruh yang besar terutama dalam hubungan antarnegara. Kemajuan teknologi telah



memberikan sumber (*resources*) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia, sehingga kemajuan teknologi ini seharusnya mampu dimanfaatkan secara maksimal serta bijak agar dapat memberikan *feedback* positif terhadap hubungan antarnegara yang sangat membutuhkan komunikasi. Walaupun peran informasi dalam beberapa tahun ini kurang mendapat perhatian, namun sebenarnya kebutuhan informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia, apalagi komunikasi antarnegara yang melibatkan jarak wilayah yang jauh mengakibatkan harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi guna mendukung komunikasi antarnegara dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di era seperti Industri 4.0 yang mau berubah lagi menjadi *Society 5.0*, mengakibatkan negara-negara harus beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*) agar tidak tertinggal dengan negara-negara maju.

Teknologi dan Informasi menjadi unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Kegiatan pembangunan suatu negara hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran bila dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan didasarkan pada informasi yang memadai sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui kegiatan komunikasi tetapi yang sesungguhnya yang menentukan nilai komunikasi adalah informasi yang dibawanya, apabila informasi tersebut tidak memiliki nilai seperti yang dibutuhkan oleh suatu pihak maka informasi tersebut percuma karena tidak dibutuhkan atau tidak dapat dicerna dengan baik. Amar Ahmad juga mengungkapkan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di



bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan (Ahmad 2012).

Peluang interaksi yang dilakukan antar negara di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi yang cukup besar ketika negara-negara di kawasan tersebut mengalami dekolonisasi pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1967, ASEAN terbentuk dan organisasi ini telah relatif berhasil dalam menciptakan stabilitas dalam kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya karena ASEAN berusaha untuk meningkatkan pengaruh positifnya sebagai sebuah kawasan (Pramanta 2019). Strategi yang dilakukan oleh ASEAN guna mencapai tujuannya sebagai organisasi di Asia Tenggara adalah merangkul kawasan-kawasan serta negara-negara yang bersifat vital untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kekuatan dan pengaruh sebagai sebuah kawasan. Untuk dapat menciptakan iklim yang stabil, ASEAN memiliki visi dan misi untuk dapat menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai dan aman.

Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi tentu kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai upaya kerjasama untuk dapat memaksimalkan kepentingan dan pengaruhnya secara nasional. Secara ekonomi, ASEAN memiliki prinsip dalam membangun kerjasama perdagangan, investasi, ketenagakerjaan dan lain-lain untuk dapat mencapai pembangunan modern di kawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program kerjasama yang telah ASEAN lakukan dalam memaksimalkan potensi tersebut (Berantas 2014). ASEAN memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan di negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya adalah pengaruhnya terhadap interaksi di negara-negara anggota ASEAN.

Secara geografis, posisi negara-negara ASEAN terletak diantara dua samudera yakni samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan diapit oleh dua benua yakni benua Asia dan benua Australia (Pramanta 2019). Sedangkan dari



sisi letak astronomis atau letak koordinat, mengacu pada garis lintang sebagian negara-negara ASEAN berada di wilayah iklim tropis dan subtropis lainnya, perbedaan iklim ini berpengaruh juga pada pola interaksi dari masyarakat karena perbedaan iklim dapat mempengaruhi pola interaksi. Hal ini disebabkan dengan adanya perbedaan tersebut akan berpengaruh kepada gaya hidup, kebiasaan bahkan sifat dari masyarakatnya sehingga secara geografis perbedaan ini akan mempengaruhi pola interaksi yang terjadi.

Pengaruh interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara secara khusus dapat dilihat dari pengambilan kebijakan dalam berbagai bidang kerjasama yang telah dilaksanakan oleh ASEAN. Kasus pada awal tahun 2018 yaitu diseleggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Sydney, Australia, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa apabila Australia menjadi anggota ASEAN maka akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik kawasan (Peter 2018). Namun pernyataan dari Jokowi tersebut menuai berbagai tanggapan, hal ini dikarenakan hampir semua aspek tentang Australia dan Asia Tenggara berbeda, baik dari segi sejarah, politik, ekonomi, dan budaya, meskipun keduanya memiliki aspirasi yang pada dasarnya sama, mereka mempunyai gaya yang berbeda dan kecepatan yang berbeda untuk mewujudkan aspirasi tersebut (Baogang 2014). Pernyataan yang dilakukan oleh Joko Widodo memiliki berbagai tanggapan yang serius sehingga dalam pengambilan keputusan yang dilakukan akan berhubungan dengan hubungan dan interaksi negara.

Dengan demikian, dalam perkembangan teknologi informasi, hubungan negara menjadi sangat penting mengingat interaksi yang dilakukan oleh negara tersebut akan berhubungan dengan kepentingan dan interaksi yang terjalin. ASEAN memiliki geografis yang memungkinkan untuk dapat menjadi kawasan yang besar dan kuat. Hal ini tidak terlepas dari geogratgis dan geopolitik



kawasan tersebut. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara tentu akan berpengaruh terhadap setiap pernyataan yang dilakukan oleh actor negara.

5. Kesimpulan

Pada perkembangan teknologi informasi, interaksi negara di kawasan Asia Tenggara ASEAN cukup membantu membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang ada di ASEAN. Tidak hanya itu, kerjasama antar negara terus berlanjut secara terus menerus melalui pelaksanaan berbagai proyek besar dalam berbagai aspek, baik dalam bidang perdagangan, iptek, peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertanian, hingga pada peningkatan kualitas hidup dan *human security*. Perkembangan ini yang memungkinkan ASEAN menjadi kawasan yang besar dalam menjamin stabilitas dan keamanan negaranya. Oleh karena itu, dalam pengaruh interaksi antar negara ASEAN menjadi sangat penting dalam memajukan kawasan dan negaranya dengan berbagai instrument yang terjalin.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amar, 'Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi', *Dakwah Tabligh*, 13 (2012), 137–49 <<https://doi.org/10.3386/w18571>>
- Bainus, Arry, and Junita Budi Rachman, 'Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional', *Intermestic: Journal of International Studies*, 2.2 (2018), 109 <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>>
- Budi, Triyoga, and Sugeng Berantas, 'Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total Ri Defense Diplomacy As Part of the Total Indonesian Diplomacy', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4.2 (2014), 165–84



- Burchill, Scott, 'The National Interest in International Relations Theory', *The National Interest in International Relations Theory*, 2005, 1–224
<<https://doi.org/10.1057/9780230005778>>
- Hidayat, Safril, 'Diplomasi Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4.2 (2018) <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.330>>
- Iriawan, Sony, 'The Silk Road Economic Belt Policy in Supporting Chinese Geopolitic Projections in the Region', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10.2 (2020), 141 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.895>>
- Muhdi, Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, and Suwarno Widodo, 'Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah', *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4.2 (2017), 135 <<https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145>>
- Pramanta, Rio Akbar, Roihanatul Maziyah, Dela Karisma, Putri Rahma Asri, Ayu Tiara Karel Bua, Dimas Bagas Priambodo, and others, 'Kemitraan Strategis Non-Zero Sum Game: Hubungan ASEAN-Australia Dalam Konteks Geopolitik', *Indonesian Perspective*, 3.2 (2019), 111 <<https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22347>>



Implikasi Pembangunan Ekonomi dan Politik yang Buruk terhadap Konflik Lokal dan Terorisme

Rohannisa Naja Rachma Savitri
Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan
E-mail: Annisa.savitri@gmail.com

Abstract

Economic and political development are expected to be able to bring an optimal distribution of welfare to all levels of society. However, when the policies are not properly organized, this will certainly present economic and political inequality which then becomes the gateway for conflict and violence to arise in the community such as local conflict and terrorism. The purpose of this study is to determine the relation between the poor economic and political development and its implications for the emergence of local conflicts and terrorism. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis and library study as a technique in collecting the required data. In addition, this study uses conflict theory and social welfare theory and also uses the concept of economic and political development and the concept of terrorism as a tool to explain the problems of this research. From the research that has been conducted, the researcher then draws the conclusion that the poor implementation of existing policies regarding the economical and political development that occurs has an indication of the occurrence of local conflicts and the emergence of crimes like terrorism. It can be concluded, from observing such events that happened in the past, instability in economic and political development can be a major trigger in the emergence of local conflicts and terrorism.

Keywords: Economic and political development, Local Conflict, Terrorism



1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan cita – cita dari semua bangsa, terutama negara Dunia Ketiga. Mereka mendambakan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar, angka kekayaan rata – rata yang semakin meningkat, pemerataan kesejahteraan secara optimal, kualitas hidup dan lingkungan yang baik, serta ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial. Apabila semua aspek ini terpenuhi, maka suatu negara telah berhasil dalam membangun ekonomi, dan keberhasilan tersebut akan bermuara pada peningkatan rasa harga diri bangsa serta masyarakat nya (Pearce, Barbier and Markandya 1990, 1-3). Namun, pembangunan ekonomi tidak berada di ruang hampa. Pembangunan ekonomi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek – aspek politis dan kelembagaan. Secara simultan, pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerintah menjamin stabilitas. Namun, apabila aspek – aspek tersebut tidak tertata dengan baik, yang kemudian menciptakan ketimpangan ekonomi dan politik, terdapat tendensi bagi munculnya konflik serta kekerasan. Hubungan realsional antara pembangunan ekonomi dan politik dalam negara tersebut yang kemudian dapat mendeterminasi perkembangan suatu masyarakat (Solimano 2005, 1). Di sisi lain, konflik dan kekerasan memiliki bentuk yang beragam, dimana konflik terbesar adalah konflik lokal dan terorisme.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembangunan Ekonomi dan Politik

Pemahaman bahwa pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan politik dalam suatu masyarakat sejatinya merupakan



diskursus yang baru. Sebelumnya, pembangunan ekonomi diartikan secara lebih sederhana. Pengukuran pembangunan ekonomi hanya berkiblat pada angka pendapatan per kapita nasional. Pandangan tradisional ini berfokus pada pembangunan melalui industrialisasi. Semakin cepat bertumbuhnya kawasan industri dan berkurangnya daerah rural dan agrikultur, semakin cepat pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, definisi ini kemudian berubah satu dekade setelah Perang Dunia II, di mana banyak negara berkembang yang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonominya tanpa perubahan signifikan pada aspek kehidupan masyarakatnya. Hal ini kemudian membawa para pemikir kepada kesimpulan bahwa definisi pembangunan ekonomi yang digunakan sangatlah sempit (Todaro and Smith, Economic Development 2015, 12).

Amartya Sen pun mengemukakan sebuah pandangan baru terhadap pembangunan ekonomi, di mana kemiskinan tidak bisa diukur secara jelas menggunakan pendapatan ataupun jenis satuan ukur konvensional lainnya. Kemiskinan diukur dari hal – hal penting yang secara fundamental dimiliki oleh tiap – tiap individu. Artinya, indikator pembangunan ekonomi bukan hanya ketersediaan suatu barang ekonomi, tetapi juga nilai fungsi barang ekonomi tersebut bagi tiap – tiap individu, sehingga dapat ditarik pengertian pembangunan ekonomi secara luas. Pembangunan ekonomi diyakini, baik secara langsung maupun tidak, akan mengarahkan masyarakat kepada kebebasan masyarakat dalam memilih (*freedom of servitude*) sebagai bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia (Todaro and Smith, Economic Development 2015, 18-19). Seperti yang telah disebutkan di awal, pembangunan ekonomi memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu negara dan masyarakatnya. Tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Konteks ini pun berlaku dua arah; kondisi social budaya di suatu daerah juga akan



memengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jurnal ini lebih terfokus pada pengaruh pembangunan ekonomi dan politik yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya konflik baik konflik lokal maupun terorisme yang ada di masyarakat.

Politik dalam konteks ini dapat dilihat sebagai suatu upaya dalam mengalokasikan kekuasaan. Seperti halnya dengan status sosial yang didapat melalui tiga cara – *assigned, ascribed, achieved* – alokasi kekuasaan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pandangan konvensional akan alokasi kekuasaan adalah kekuasaan pemerintah yang dialokasikan melalui lembaga – lembaga publik. Selain itu, alokasi kekuasaan juga dapat ditemukan di tengah masyarakat contohnya adalah kekuasaan politik yang dialokasikan kepada individu – individu yang berasal dari sub – kelompok masyarakat tertentu, sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama. Cara terakhir pengalokasian kekuasaan adalah melalui koersi, dengan bentuk antara lain paksaan, ancaman, maupun kekerasan (Frazer 1999, 222).

2.1 Teori Konflik

Untuk membangun sebuah pemahaman mengenai konflik yang terjadi pada masyarakat, terdapat beberapa konsep dan teori yang diperkenalkan dan digunakan oleh beberapa ahli. Teori konflik merupakan teori yang bertolak belakang dengan teori struktural fungsionalisme. Gagasan yang dikemukakan oleh Karl Marx melihat masyarakat sebagai sistem kompleks yang saling berkompetisi, bukan sebuah equilibrium. Masyarakat terdiri dari individu – individu yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Hal inilah yang memunculkan ketimpangan dalam masyarakat; mempertahankan kategori – kategori tersebut dengan segala kekuasaannya di masyarakat. Teori konflik juga melihat kedudukan tiap kelompok yang berbeda;



ada yang lebih dominan dan ada juga yang terpaksa menjadi submisif (Dadgar 2020, 43-44).

Konflik berasal dari kata *con* (bersama) dan *fligere* (friksi) (Setiadi and Kolip 2011, 345). Secara umum konflik sosial berarti friksi yang terjadi antar individu. Friksi ini dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari perbedaan kelas sosial hingga perang antarnegara. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai upaya untuk mencapai suatu nilai, pengakuan, dan kekuasaan, yang mana melibatkan keharusan untuk mengeliminasi rival yang ada untuk mencapai tujuan tersebut (Zeitlin 1998, 156). Berbeda dengan pengertian konflik, yang mana menekankan pada adanya argumentasi dan friksi, dalam konteks ini melibatkan tidak hanya individu, tetapi juga kelompok – kelompok masyarakat dan kekerasan (Narwoko and Suyanto 2005, 68). Konflik sosial secara garis besar bersifat horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti terdapat kemungkinan munculnya suatu konflik antar etnis, agama, ras dan golongan. Akan tetapi, tidak menutup juga adanya konflik vertical yang merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial dapat berbentuk konflik rasial, konflik politik, konflik internasional, dan konflik pribadi (Soekanto 1992, 86).

2.2 Teori Kesejahteraan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan tentu saja saling berkaitan. Menurut Suparlan, kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, melainkan merupakan suatu keadaan dan kegiatan. (Sud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial 2006, 5). Adapun pengertian – pengertian para ahli lain



mengenai kesejahteraan sosial yaitu Friedlander mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan – pelayanan dan lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan – hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial 2006, 8). Midgley mengemukakan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur antara lain, pertama, setinggi apa masalah – masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan – kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan – kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu – individu, keluarga – keluarga, komunitas – komunitas dan bahkan seluruh masyarakat (Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial 2006, 5).

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran – ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*), dan pembangunan manusia (*human development*) (Sen 2008, 8). Fungsi dari kesejahteraan sosial ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan – tekanan yang diakibatkan oleh perubahan – perubahan sosio – ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi – konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi – fungsi kesejahteraan sosial yakni: (Fahrudin 2012, 12)

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)



Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah – masalah sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi – kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi Kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikansumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Support*)

Mencakup kegiatan – kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector ataiu bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

2.3 Terorisme

Secara etimologi, kata “terorisme” berasal dari kata *terror* dalam Bahasa Inggris, atau *terrere* dalam Bahasa Latin, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan (Damayanti, et al. 2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *terror* sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan (Budaya n.d.). Ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa *terror* merupakan suatu bentuk pemikiran, sedangkan terorisme adalah aksi atau tindakan yang sudah terorganisir. Namun, mayoritas memiliki pendapat bahwa *terror* bisa terjadi tanpa adanya terorisme, sementara *terror* merupakan unsur asli yang melekat pada terorisme (Damayanti, et al. 2013, 5).



Isitilah terorisme memang sudah ada dan digunakan sejak ribuan tahun silam. Terorisme terus berkembang dan mengalami perubahan baik dari segi motif maupun pola aksi. Aksi tersebut juga dapat bermotifkan politik, ideologi, ekonomi, atau bahkan gabungan dari motif – motif tersebut. Tindakan terorisme ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi sosial politik, ideologi, seperti ideologi radikalisme yang merupakan embrio sehingga menumbuhkan aksi terorisme, dan faktor ekonomi. Pada era sekarang, telah banyak muncul kelompok – kelompok terorisme baik secara nasional maupun internasional seperti, Jamaah Islamiya (JI), Al-Qaeda, Abu Sayyaf Group, dsb. (Damayanti, et al. 2013, 42-51)

Dengan adanya kelompok – kelompok terorisme serta berbagai aksi yang mereka lakukan, tentu saja menimbulkan dampak yang cukup merugikan bagi pihak – pihak yang merasakan. Banyak korban yang timbul dari aksi terorisme, terutama masyarakat sebagai korban langsung yang merasakan. Secara luas, aksi terorisme berdampak pada banyak hal terkait kehidupan bangsa dan negara. Berbagai kerugian sebagai dampak dari terorisme dapat dilihat di berbagai bidang seperti pertahanan dan keamanan suatu negara, ideologi, stabilitas politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan, bahkan dapat juga menimbulkan dampak pada hubungan antar agama. Aksi terorisme yang dilakukan menimbulkan rasa bangga terhadap keberhasilan mereka untuk menebarkan rasa takut serta hal lain yang membuat mereka berfikir bahwa mereka berhasil untuk melakukan aksi terror (Irwansyah 2018, 999).

3 Metode Penelitian

Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk



mendesripsikan / menjelaskan permasalahan secara luas dengan cara pengumpulan data yang sebanyak – banyaknya dan dikupas sedalam – dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik pengmpulan data yang berbentuk studi kepustakaan / studi literatur dengan metode deskriptif dari sumber – sumber penelitian sebelumnya maupun data sekunder lainnya.

Sumber kepustakaan tersebut berasal dari kumpulan – kumpulan jurnal, buku, dan kajian – kajian yang diteliti dan ditulis oleh individu, instansi, serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penerapan pembangunan ekonomi dan poliitik terhadap konflik lokal dan terorisme.

4 Hasil dan Diskusi

4.1 Implikasi Pembangunan Ekonomi dan Politik yang Buruk terhadap Konflik Lokal

Sebagaimana kita ketahui, pembangunan ekonomi dan politik memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu negara dan masyarakat di dalamnya. Apabila dilihat dari sisi pembangunan ekonomi maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu sumber daya demi tercapainya sebuah kesejahteraan pada manusia. Kegagalan dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dapat menjadi pemicu lahirnya permasalahan baru, yaitu konflik. Banyak yang mengatakan bahwa ekonomi tidaklah relevan dengan terjadinya suatu konflik, maka disitulah terjadinya kesalahan pada pandangan tersebut. Untuk memahami bagaimana hubungan antara pembangunan ekonomi dengan konflik dapat digunakan model pendekatan konflik sebagai posterior.



Konflik sebagai posterior ini meihat pembangunan ekonomi sebagai variabel independen terjadinya suatu konflik, di mana konflik muncul ketika adanya kegagalan pembangunan ekonomi (Perwita 2015). Kondisi ekonomi dan timbulnya suatu konflik sangatlah berkaitan, di mana pada kondisi ekonomi dapat terjadi ketimpangan dan kelangkaan sumber daya. Ketimpangan ini terjadi ketika pembangunan ekonomi hanya berfokus pada usaha menyejahterakan Sebagian dari masyarakat saja, sementara anggota masyarakat yang lainnya diabaikan. Situasi ketimpangan ini pun tidak bisa dihindari, akan tetapi ketika kondisi ini meningkat, maka konflik sangat mungkin terjadi seperti contohnya, adanya ketimpangan antara masyarakat yang kaya dan miskin tidak hanya terjadi karena aktivitas ekonomi tetapi juga karena kebijakan publik terkait ekonomi.

Kita dapat mengambil contoh yaitu, Konflik Sampit, konflik lokal yang terjadi di Kalimantan Tengah pada Februari tahun 2001. Terjadi pembunuhan sekitar 500 orang beretnis Madura oleh komunitas Dayak serta sekitar 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya rusak (Rinaldo 2019). Konflik ini berujung pada tak satupun penduduk etnis Madura yang tinggal di Kota Sampit. Konflik ini muncul akibat proses peminggiran secara ekonomi dan politik kaum Dayak oleh Pemerintahan Orde Baru sehingga memunculkan ketimpangan sosial ekonomi antara masyarakat asli (Dayak) dengan masyarakat pendatang (Madura). Contoh lain adalah seperti yang terjadi di Maluku dan Poso yang sebagian disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi antara kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda (Damayanti, et al. 2013, 34)

Tidak hanya pembangunan ekonomi yang menjadi pemicu dalam munculnya konflik lokal, namun dapat juga dilihat dari kacamata politik. Namun, pertama – tama, mari kita lihat dari teori konflik, dapat ditemukan bahwa konflik – konflik tersebut bermuara dari perbedaan mendasar dari



Masyarakat Hukum adat dengan masyarakat pada umumnya. Konflik ethno – politik, menurut Gurr, adalah konflik antar kelompok etnis terhadap aktor politis lainnya. Friksi politik dalam konflik etnis tidak hanya dipicu oleh keinginan etnis untuk mencari kesetaraan hak dan kekuatan politik, tetapi juga untuk mempertahankan entitasnya. Konflik memiliki dua objektif yaitu untuk mendapatkan kemerdekaan atau mendapatkan akses dalam sistem politik yang ada di masyarakat, yang memiliki tendensi untuk mengoperasi kelompok – kelompok etnis tersebut, memicu digunakannya upaya – upaya koersif dan berbentuk kekerasan yang dapat tereskelasi menjadi konflik skala besar (Lobell and Mauceri 2004, 136).

Dalam situasi di mana terdapat stabilitas kekuasaan antara kelompok etnis dan kelompok masyarakat lainnya, konflik dapat dihindari. Namun, apabila terdapat redistribusi kekuasaan yang substansial – akibat migrasi, tingkat natalitas yang berbeda, atau modernisasi – yang kemudian mengubah kedudukan ekonomi, politik, dan sosial, maka akan muncul tuntutan untuk merelokasi kekuasaan tersebut kembali. Dalam kondisi ini lah ketimpangan politik antara mayoritas dan minoritas menjadi sangat terlihat. Konflik juga dapat diperparah dengan tidak terepresentasikannya dengan baik kelompok etnis dalam lembaga pemerintahan (Lobell and Mauceri 2004, 5-6). Cara yang berbeda dalam mempersepsikan kehidupan dengan segala aspeknya memperlebar potensi konflik kepentingan antara kelompok masyarakat pada umumnya dan kelompok etnis/masyarakat hukum adat. Pada akhirnya, konflik kepentingan ini sangat berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pendistribusian kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah memiliki potensi untuk menyebabkan *abuse of power*. Kekuatan dan kekuasaan, sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi



perilaku orang lain dengan atau tanpa resistensi. Otoritas yang dimiliki pemerintah sendiri merupakan manifestasi kekuasaan yang berupa hak, legitimasi, dan justifikasi. Pada Akhirnya, kepentingan yang dibawa oleh tiap – tiap perseorangan dijustifikasi dengan peraturan yang dikeluarkan (Cragun, Cragun and Konieczny 2008).

Dengan sistem politik yang mana kebijakannya ditentukan oleh mayoritas, maka kelompok – kelompok dengan kekuatan politik yang lebih kecil menjadi korban dari kekerasan etnis. Kekuasaan kelompok mayoritas tersebut ditentukan tidak hanya dari entitas kelompok sosialnya, tetapi juga dari kekayaannya. Dengan kata lain, menurut Amy Chua, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan alokasi politik, yang akan mengarah pada konflik. Argumentasi ini menjadi landasan bagi pemahaman bahwa demokrasi harus diperkenalkan secara perlahan dan hati – hati di negara – negara berkembang dengan pendapatan menengah ke bawah untuk menghindari besarnya celah politik, baik secara kelembagaan maupun di tangan masyarakat itu sendiri (Soeters 2005, 35-36)

4.2 Implikasi Pembangunan Ekonomi dan Politik yang Buruk terhadap Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan juga disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dilakukan dalam berbagai bentuk juga. Parameter terorisme tidak hanya menjadikan pelaku atau pendukung pelaku sebagai parameter tetapi ada juga yang menjadikan cara dan motif pelakunya sebagai parameter. Seiring berkembangnya zaman, terorisme juga mengalami perubahan dari segi motif maupun pola aksi. Namun, dibalik semua bentuk – bentuk terorisme juga pasti terdapat latar belakang dari aksi terorisme tersebut. Latar belakang tersebut



dapat dilihat dari implikasi pembangunan ekonomi dan politik yang buruk sehingga muncul Gerakan atau aksi terorisme. Motif tersebut bisa saja berlatar belakang politik, ideologi, ekonomi, atau bahkan gabungan dari ketiga motif itu.

Jika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi, tentu saja dalam suatu pemerintahan pasti terdapat kegagalan pemerintah untuk menciptakan sebuah kesejahteraan untuk rakyatnya yang kemudian dapat menjadi pemicu terjadinya aksi terror (Damayanti, et al. 2013, 34). Dari kegagalan ini timbullah kekecewaan yang kemudian menjadi lahan bagi tumbuhnya konflik, aksi separatisme, dan juga terorisme. Gerakan separtisme juga dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan golongan masyarakat tertentu terhadap kebijakan – kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan warga. Dari situ lah kelompok teroris juga dapat memanfaatkan keadaan di mana masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintah sehingga hal tersebut dijadikan alat untuk memercik kebencian terhadap pemerintah. Tidak heran jika kemudian gerakan – gerakan terorisme ini mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menggulingkan pemerintah yang dianggap korup.

Selain itu, angka pengangguran yang tinggi juga dapat menjadi pemicu dan dapat menjadi peluang bagi kelompok – kelompok teroris dan radikal untuk merekrut masyarakat menjadi anggota (Damayanti, et al. 2013, 35). Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemahaman agama yang kemudian diselipkan dengan ayat – ayat kitab suci yang diselewengkan menjadi faktor yang mudah mengubah para pengangguran menjadi pelaku terror. Pemerintah perlu untuk memperhatikan kondisi – kondisi yang melibatkan kondisi perekonomian masyarakat. Kesejahteraan ekonomi harus didapatkan oleh seluruh warga negaranya secara merata, akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya terorisme. Dengan demikian, gerakan



– gerakan kelompok terorisme tidak mendapatkan peluang untuk dukungan simpati dari masyarakat.

Pembangunan dan kondisi politik suatu negara juga sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya gerakan – gerakan atau kelompok terorisme. Terlepas dari pembangunan ekonomi, peran politik menjadi sangat berpengaruh terhadap paham kebangsaan dan terorisme. Dengan kata lain, apabila suatu kebijakan politik tidak merata dan tidak dikelola dengan baik, maka akan ada potensi bagi tumbuh kembangnya terorisme dalam kelompok masyarakat tersebut (Keefer and Loayza 2008, 1-2). Terorisme dalam arti “penciptaan rasa takut dengan melakukan pembunuhan, penculikan, dan sebagainya” (Irwansyah 2018, 88), muncul ketika ada krisis, terutama krisis negara yang terpecah (seperti kasus yang terjadi di Lebanon), merajalelanya korupsi (kasus di Italia), atau sangat refresif (kasus Jerman Barat), serta sistem politik tersumbat (kasus Italia tahun 1970 sebagai akibat “kompromi historis” antara partai Demokrat Kristen dan Komunis) (B.S. 2008, 874-875).

Faktor politik berupa masuknya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundangan – perundangan suatu negara (Sumardewi 2012, 5). Dalam menjalankan aksinya, terorisme biasanya merupakan sebuah bentuk kekerasan, disertai dengan aksi terror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengubah ideologi Negara yang bersangkutan (Sumardewi 2012, 5). Tindakan kekerasan dan terror tersebut yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait dengan keamanan negara sekaligus menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan karena pemerintahan dianggap tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme (Sumardewi 2012, 6).



Jika mengambil contoh dari apa yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat pada masa Orde Baru, di mana terdapat kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto karena tidak menjalankan Syariat Islam, melainkan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang dianggap gagal memberikan rasa aman serta kesejahteraan bagi rakyatnya, terutama bagi umat Islam (Damayanti, et al. 2013, 23). Pemerintahan pada masa Orde Baru dinilai terlalu otoriter, korup, dan represif terhadap kelompok – kelompok Islam. Seiring berjalannya waktu, pada Era Reformasi kondisi politik Indonesia mengalami perubahan di mana timbul kebebasan dalam semua bidang. Namun, sayangnya di masa itu terdapat ketidakstabilan keadaan seperti korupsi, kesenjangan perekonomian masyarakat dan perebutan kekuasaan antar kepentingan politik. (Damayanti, et al. 2013, 24). Sebagai hasil dari ketidakstabilan politik dalam Indonesia, maka hal tersebut memberikan peluang terhadap gerakan – gerakan radikal dan kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi mereka, melaksanakan perekrutan anggota baru, serta melakukan aksi – aksi dalam rangka menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

5 Kesimpulan

Didasarkan pada sebuah negara yang memiliki keinginan untuk berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasar serta pemerataan kesejahteraan secara optimal, maka pembangunan ekonomi dan politik perlu dilakukan sebaik – baiknya untuk menjamin stabilitas. Namun, seringkali aspek – aspek tersebut tidak tertata dengan baik, yang kemudian menciptakan ketimpangan ekonomi dan politik, sehingga terdapat tendensi bagi kemunculan konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut memiliki bentuk yang beragam, yang di antaranya adalah konflik lokal dan terorisme.



Konflik lokal yang muncul adalah sebagai akibat dari kegagalan pembangunan ekonomi, seperti pemerataan kesejahteraan sehingga terjadinya suatu ketimpangan sosial. Ketimpangan ini terjadi ketika pembangunan ekonomi hanya berfokus pada menyejahterakan sebagian dari masyarakat saja, sementara anggota masyarakat yang lainnya diabaikan. Selanjutnya jika dilihat dari segi politik, adanya redistribusi kekuasaan yang substansial yang kemudian mengubah kedudukan ekonomi, politik, dan sosial, maka akan muncul tuntutan untuk merelokasi kekuasaan tersebut kembali, sehingga ketimpangan politik antara mayoritas dan minoritas menjadi sangat terlihat.

Instabilitas pembangunan ekonomi dan politik juga dapat memicu timbulnya gerakan – gerakan atau aksi terorisme. Kegagalan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi menjadi faktor utama karena munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan sehingga muncul lah konflik dan aksi terror. Sebagai akibat dari kegagalan pemerataan ekonomi, banyak timbul pengangguran dalam masyarakat sehingga hal tersebut dapat menjadi sasaran empuk kelompok – kelompok terorisme untuk menanamkan idenya yang menjanjikan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya kelompok terorisme itu akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Peran politik menjadi sangat berpengaruh juga terhadap paham kebangsaan dan terorisme. Apabila suatu kebijakan politik tidak merata dan tidak dikelola dengan baik, maka akan ada potensi bagi tumbuh kembangnya terorisme dalam kelompok masyarakat tersebut. Faktor politik berupa masuknya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik membuat masyarakat melakukan tindakan – tindakan kekerasan sehingga membentuk kecemasan dalam masyarakat sekaligus menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal melindungi waga negaranya.



Daftar Pustaka

- B.S., Tri Wibowo. 2008. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budaya, Kementerian Pendidikan dan. n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Accessed Oktober Minggu, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teror>.
- Cragun, Ryan T., Deborah Cragun, and Piotr Konieczny. 2008. *Introduction to sociology*. Seven Treasures Publication.
- Dadgar, Yadollah. 2020. "Economics and Politics: Editorial note." *International Journal of Economics and Politics Vol 1 No. 1 1*.
- Damayanti, angel, Hemay, Idris, Muchtadlirin, Sholehudin A, Pranawati, and Rita. 2013. *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Frazer, Elizabeth. 1999. *The Problems of Communitarian Politics: Unity and Conflict*. Oxford: Oxford University Press.
- Irwansyah. 2018. "Politik Global dan Isu Teroris." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Vol.1 No.1 88*.
- Keefer, Phili, and Norman Loayza. 2008. *Overview: Terrorism, Economic Development, and Political Openness*. Cambridge University Press.
- Lobell, Steven E., and Phillip Mauceri. 2004. *Ethnic Conflict and International Politics: Explaining Diffusion and Escalation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lobell, Steven, and Philip Mauceri. 2004. *Ethnic Conflict and International Politics: Explaining Diffusion and Escalation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Narwoko, J. Dwi, and Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Pearce, David, Edward Barbier, and Anil Markandya. 1990. *Sustainable Development: Economics and Environment in Third World*. London: Edward Elgar Publishing Limited.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2015. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rinaldo. 2019. *Kerusuhan Sampit, Kegagalan Merawat Perbedaan 18 Tahun Silam*. 18 Februari. Accessed Oktober 3, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-perbedaan-18-tahun-silam>.
- Sen, Amartya. 2008. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiadi, Elly M., and Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahanannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeters, Joseph L. 2005. *Ethnic Conflict and Terrorism: The Origins and Dynamics of Civil War*. Abingdon: Routledge.
- Solimano, Andres. 2005. *Political Crisis, Social Conflict, and Economic Development: The Political Economy of the Andean Region*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Sumardewi, Luh Ashari. 2012. "Upaya Indonesia dalam Memberantas Terorisme di Era Susilo Bambang Yudhoyono."
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- . 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- . 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2015. *Economic Development*. New Jersey: Pearson.
- . 2015. *Economic Development*. New Jersey: Pearson.
- Zeitlin, Irving M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.



Problematika Ancaman Pengungsi Dalam Redefinisi Konsep Keamanan

RR Zahroh Hayati Azizah

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan

*rrazizah14@gmail.com

Abstrak ©

Keamanan merupakan hal yang esensial bagi negara. Negara dikatakan aman apabila terbebas dari ancaman. Definisi keamanan mengalami pergeseran yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin dan tragedi 11 September 2001. Perkembangan konsep keamanan yang pada awalnya hanya terbatas pada ancaman militer dan ditujukan kepada negara, saat ini telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan umat manusia. Masalah Pengungsi merupakan salah satu bukti pergeseran konsep keamanan tersebut. Tujuan artikel ini dibuat untuk menganalisis ancaman pengungsi dalam redefinisi konsep keamanan. Metode yang digunakan adalah content analysis. Pada artikel ini, penulis menggunakan konsep keamanan dari segi tradisional dan non tradisional untuk membantu memahami bagaimana konsep keamanan saat ini. Serta menggunakan definisi pengungsi untuk memahami perihal pengungsi.

Keywords: Security, Threat, Policy, Refugee

6. Pendahuluan

Seiring dengan terjadinya konstelasi politik internasional dan berkembangnya hubungan internasional di dunia, konsep keamanan juga



mengalami pergeseran. Berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi penanda pergeseran definisi keamanan bagi negara bangsa. Pergeseran definisi konsep keamanan tersebut dapat dilihat dari esensi keamanan yang pada awalnya berpusat pada sektor militer saja kemudian berkembang menjadi sektor militer dan nirmiliter seperti ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.

Salah satu ancaman yang muncul paska Perang Dingin berakhir adalah masalah pengungsi. Kemunculan pengungsi ini dikarenakan faktor ekonomi maupun adanya tindak kejahatan kemanusiaan di negara asal mereka, sehingga menuntut mereka untuk keluar dari negaranya secara paksa demi keselamatan dirinya. Mayoritas pengungsi ini berasal dari negara-negara yang mengalami Aram Spring, dimana konflik terjadi di internal negara mereka. Semakin lama jumlah pengungsi semakin bertambah. Semakin banyak negara negara gagal baik dari segi ekonomi maupun adanya konflik dalam negeri akibat perbedaan suku, agama, ras dan budaya antar warga negaranya membuat semakin banyak jumlah pengungsi. Masalah pengungsi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, namun masalah pengungsi ini membutuhkan peran dari berbagai aktor seperti NGO, Lembaga Internasional, Individu dan aktor lainnya. Ketika para pengungsi ini keluar dari negaranya, maka tentu saja mereka berharap menemukan tempat yang lebih aman dan nyaman bagi dirinya. Permasalahan pengungsi ini tidak hanya merugikan negara asal pengungsi, namun juga semua negara bisa jadi menerima efek dari permasalahan pengungsi ini. Keberadaan pengungsi di negara lain, tentu membawa dampak bagi negara tersebut, baik dari segi ekonomi, keamanan dan sosial. Banyak negara yang mengeluhkan keberadaan pengungsi di negaranya, karena justru menambah beban dan masalah bagi negaranya. Selain menambah beban ekonomi mereka adanya perbedaan budaya dan ideologi menjadi salah satu faktor yang dikhawatirkan



pemerintah negara penerima. Masalah keamanan pun menjadi salah satu pertimbangan negara penerima pengungsi. Oleh karena itu, dalam menangani pengungsi mereka harus lebih berhati-hati dan lebih bijak. Permasalahan pengungsi tidak hanya mengancam keamanan negara saja, namun juga keamanan manusia yaitu keamanan pengungsi itu sendiri. Mengingat alasan mereka keluar dari negaranya adalah karena adanya kekhawatiran dan perasaan tidak aman apabila tetap berada di negaranya. Maka dari itu, mereka mencari tempat yang lebih baik dari pada negaranya. Masalah pengungsi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa adanya pergeseran konsep keamanan. Oleh karena itu, artikel ini dibuat untuk menganalisis masalah pengungsi dalam redefinisi konsep keamanan. Artikel ini ditulis dengan metode *content analysis* dimana penjelasan yang berupa teks baik yang bersumber dari berita, buku, jurnal, dokumen sejarah, dan sumber dokumen lain akan dipaparkan sedemikian rupa kemudian dianalisis menjadi suatu kajian definisi yang sesuai dengan artikel ini. Pada pembahasan artikel ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang pergeseran konsep keamanan tradisional ke konsep keamanan non tradisional. Bagian kedua pada pembahasan artikel ini akan menjelaskan tentang tantangan masalah pengungsi terhadap keamanan nasional dalam redefinisi konsep keamanan.

7. Tinjauan Pustaka

7.1. Konsep Keamanan Tradisional dan Non Tradisional

Secara etimologis, keamanan atau *security* berasal dari bahasa latin yaitu *securus* (se+cura) yang bermakna terbebas dari bahaya dan terbebas dari ketakutan. Kata ini juga dapat bermakna dari gabungan kata *se* yang berarti tanpa atau *without* dan *curus* yang berarti *uneasiness*. Apabila digabungkan kata ini bermakna *liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or*



threats. (Perwita, 2006) Secara singkat keamanan dapat dijelaskan sebagai kondisi yang bebas dari ancaman dan bahaya. (Praditya 2016) Kondisi aman ini tentunya tidak hanya diinginkan oleh negara bangsa, namun juga individu maupun kelompok. Secara terminologi konsep keamanan dibagi menjadi dua. Yakni keamanan yang dilihat dari pendekatan tradisional dan keamanan dari sudut pandang non tradisional. (Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War.*, 1991)

Konsep Keamanan dengan pendekatan tradisional menitikberatkan negara (*state*) sebagai aktor utama dan penggunaan militer. Konsep keamanan dalam pendekatan tradisional merupakan suatu kondisi terbebasnya dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari luar atau eksternal negara tersebut. (Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War.*, 1991) Dalam pendekatan tradisional ini keamanan dapat diartikan sebagai keamanan sebuah Negara yang dapat diancam oleh militer negara lain dan oleh karena itu maka harus dipertahankan pula dengan menggunakan militer negara tersebut. (Mutimer 1999) Negara sebagai subjek sekaligus objek keamanan dan negara menjadi inti dalam usaha menjaga keamanan negaranya. Maka dari itu pendekatan keamanan tradisional erat kaitannya dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah seperti yang termaktub di dalam pasal 2 (4) Piagam PBB. Dalam pasal tersebut dinyatakan "*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.*" (Amaritasari, 2015)

Kemudian keamanan non tradisional, dalam buku yang berjudul *The Evolution of International Security Studies*, Buzan dan rekanannya Hansen mengungkapkan beberapa pemikiran mengenai konsep keamanan yang disebut sebagai pendekatan non tradisional. Pertama bahwa keamanan tidak hanya



terfokus pada keamanan negara, namun juga keamanan adalah upaya untuk melindungi setiap individu, kelompok, lingkungan, dan keberadaan bumi itu sendiri. Kedua, terkait pentingnya untuk mengetahui sumber-sumber ancaman. Bahwa sumber ancaman dapat berupa dari dalam ataupun dari luar negara. Kemudian pemikiran yang ketiga yaitu, studi keamanan tidak hanya mengenai sektor militer saja, tetapi lebih luas seperti sektor ekonomi dan sektor lingkungan. Kemudian pemikiran yang keempat, Buzan dan Hansen (2009) juga mencoba mengembangkan pemikiran bahwa dalam studi keamanan, tidak hanya memiliki perasaan terancam, namun juga upaya untuk menyerang atau mendominasi. (Septa 2018) Pada intinya, dalam konsep keamanan non tradisional sudah tidak berbicara tentang *interstate relations*, namun sudah melihat keamanan individu. (Praditya 2016)

2.2 Keamanan Nasional

Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. (Praditya 2016) Keamanan nasional juga dapat diartikan kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi Negara melalui kekuatan ekonomi, militer, dan politik, serta pengembangan diplomasi. Dalam konsep ini yang ditekankan adalah kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara. (Darmono et al., 2010)

2.3 Konsep Pengungsi

Menurut Konvensi 1951 pengungsi (*refugee*) adalah orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan (ras), agama,



kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali ke sana karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. (Pasal 1 Konvensi 1951)

8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *content analysis*. Dimana peneliti dalam mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti buku, teks, esay, Koran, novel, artikel, lagu, majalah, jurnal, ataupun komunikasi lain yang dapat dianalisis. Analisis merupakan sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konteks aktual dan fitur internal media. Nantinya akan digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks. Teks dapat diartikan sebagai, berita, buku, jurnal, wawancara, diskusi, dokumen sejarah, percakapan, iklan, dokumen lain.

9. Hasil dan Diskusi

4.1 Pergeseran Definisi Konsep Keamanan

Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, negara bangsa mengeluarkan kebijakan nasional guna mendukung tercapainya cita-cita bangsa. Salah satu bentuk kebijakan nasional adalah kebijakan dalam hal keamanan nasional. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, apabila dilihat dari pendekatan keamanan secara tradisional agenda kebijakan negara bangsa mengenai konsep keamanan yaitu dapat diartikan sebagai keamanan sebuah Negara yang dapat diancam oleh militer negara lain dan oleh karena itu maka harus dipertahankan pula dengan menggunakan militer negara tersebut (Mutimer 1999) Konsep keamanan tradisional ini muncul ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia



Kedua, dan Perang Dingin. Pada masa itu, konsep keamanan erat keitannya dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah seperti yang termaktub di dalam pasal 2 (4) Piagam PBB. Dalam pasal tersebut dinyatakan "*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.*" (Amaritasari, 2015) Pada masa itu untuk menciptakan keamanan internasional munculnya system keamanan kolektif yang dikenal sebagai Liga Bangsa Bangsa dimana tindakan agresi dan tindakan perang dimulai dari pengabaian prosedur- prosedur yang telah ditetapkan dan dapat mengancam keamanan bagi semua anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa selanjutnya dibentuknya Dewan Keamanan PBB juga merupakan bentuk system keamanan kolektif dimana mereka bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pada masa Perang Dingin, di dalam Dewan Keamanan PBB pun kental akan pertikaian kedua negara adidaya yaitu AS dan Uni Soviet. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan melemparkan argument di dalam forum internasional tersebut. Kedua negara menerapkan kebijakan keamanan nasional yang mengarah pada aktivitas agresi masing-masing musuhnya. AS menerapkan kebijakan keamanan nasional dalam rangka menanggapi agresifitas dari Uni Soviet, begitu pula sebaliknya Uni Soviet= juga menerapkan kebijakan yang menangkal agresivitas dari AS. Pada masa Perang Dingin akademisi yang mendalami tentang keamanan memfokuskan perhatannya pada kekuatan maksimum baik konvensional dan nuklir. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sebenarnya di lapangan dimana kedua negara saling berlomba dalam meningkatkan persenjataanya, terutama senjata nuklir. (Amaritasari, 2015)

Berakhirnya Perang Dingin ditambah kemajuan teknologi yang semakin pesat memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi diluar batas-batas negara sehingga masalah kemanan menjadi meluas lebih dari batas geografis dan dari



berbagai dimensi kelautan, angkasa, wilayah Artic, Antartika dan bahkan cyber. Hal tersebut membuat semakin luasnya jangkauan konsep keamanan. (Amaritasari, 2015) Setelah Perang Dingin berakhir, tidak hanya membicarakan keamanan dalam konteks negara dan militer saja, namun juga isu lain seperti Hak Asasi Manusia, terorisme, perlucutan senjata, globalisasi dan teknologi. Menurut Buzan, terdapat lima faktor yang mempengaruhi perkembangan studi keamanan, yaitu *great power politics*, *technology*, *event*, *institutionalization*, dan *academic debate*. Faktor *Great Power Politics* sebagai faktor pertama dimana dibuktikan dengan adanya persaingan kekuatan besar politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam beberapa dekade pada masa Perang Dingin. Kemudian faktor *technology*, dimana dapat dilihat dari berkembangnya teknologi transportasi, komunikasi, dan juga sektor persenjataan militer. Dengan semakin berkembangnya teknologi, ancaman pun turut berkembang. Berbagai kemudahan yang didapat akibat perkembangan teknologi yang pesat, turut memudahkan kelompok-kelompok kejahatan maupun peluang berbuat jahat semakin berkembang. Sebagai contoh, dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi tentang suatu hal juga sangat mudah. Hal tersebut dapat mendukung bagi para penjahat untuk mengakses informasi-informasi penting baik dari data sistem pertahanan negara maupun dari data bank. Sehingga munculah kejahatan-kejahatan baru sangat mudah berkembang seperti jamur. Misalnya terorisme, penjualan obat-obatan terlarang, penjualan barang ilegal, dan kejahatan lain yang sangat terdukung dengan majunya teknologi informasi ini. Kemudian faktor *events*, yaitu bahwa setiap fenomena atau peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi pandangan serta hubungan internasional. Sebagai contoh, apa yang terjadi di Afghanistan dan di negara-negara Timur Tengah lainnya dimana konflik di negaranya baik melawan negara lain maupun konflik internal



mengakibatkan sejumlah penduduknya keluar dari negara mereka akibat perasaan tidak aman dan terancamnya keselamatan jiwanya apabila tetap tinggal di negara tersebut. Oleh karena itu munculah gelombang pengungsi, yang menyebabkan munculnya masalah baru dalam konsep keamanan. Faktor yang keempat adalah *institutionalization*, yaitu institusi-institusi maupun program-program baru dalam penelitian hubungan internasional tentu akan menjadi salah satu jalan dalam mengkaji isu keamanan. Sebagai contoh yaitu munculnya lembaga riset penelitian ataupun kajian ilmu baru dalam dunia akademik. Muncul juga lembaga-lembaga internasional yang ditujukan untuk membantu menangani masalah tertentu, seperti *UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee)* yang membantu menangani masalah pengungsi. Maupun NGO seperti *Green Peace* yang menangani isu lingkungan. Kemudian pada faktor *academic debate*, Buzan dan Hansen (2009) percaya bahwa analisis dalam sebuah ilmu sosial memang dibutuhkan untuk memahami dan mengkaji suatu permasalahan dalam dunia hubungan internasional. (Barry Buzan & Lenen Hensen 2009)

Pergeseran konsep keamanan tradisional ke non tradisional dapat dianalisis dari berbagai dimensi. Berdasarkan dimensi asal ancaman atau *the origin of threat* ancaman negara berasal dari luar (internasional). Pada masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin ancaman terhadap negara adalah berasal dari luar dalam hal ini ancaman yang berasal dari negara lain. Sebagai contoh ancaman pada masa Perang Dingin, dimana Amerika Serikat menganggap ancaman terbesarnya adalah Uni Soviet dengan faham komunisnya. Sebaliknya, pada masa itu, Uni Soviet menganggap ancaman terbesar bagi negaranya adalah Amerika Serikat dengan faham liberalismenya. Hal ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka. Misalnya, Australia yang merupakan sekutu Amerika Serikat, juga menganggap Uni



Soviet dan paham komunisme mereka membahayakan Australia. Hal tersebut menjadi kepentingan nasional bagi Australia, sehingga apapun yang berhubungan dengan Uni Soviet bukanlah perhatian utama bagi kepentingan nasional Australia. (Septa 2018) Sedangkan apabila dilihat dengan pendekatan keamanan non tradisional asal ancaman telah berkembang. Tidak hanya berasal dari luar saja, namun juga berasal dari dalam atau domestik. Ancaman yang berasal dari dalam negeri diantaranya terkait isu-isu primordial seperti etnis, budaya, dan agama yang termanifestasikan dalam bentuk komunal. (Perwita, Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia 2008) Misalnya di negara Indonesia sendiri konflik yang berlatarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Budaya) masih sering mewaranoi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak jarang pula konflik tersebut memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan dimensi sifat ancamannya atau *the nature of threat* pendekatan keamanan tradisional ancamannya bersifat militer saja. Dapat dilihat dari ancaman pada masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin militer digunakan selain untuk pertahanan juga digunakan untuk mengancam. Bahkan terkadang dengan meningkatnya kekuatan militer suatu negara dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara lain, meskipun tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Inilah yang disebut kaum realis sebagai *security dilemma*. Dan menurut kaum realis juga *security dilemma* dapat dicegah dengan konsep *balance of power* atau perimbangan kekuatan (Praditya 2016) Perimbangan kekuatan ini juga dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Pada masa itu kedua negara adidaya saling berlomba-lomba meningkatkan kekuatannya, bahkan kedua negara sampai mengembangkan program nuklir. Apabila salah satu negara tersebut sampai meluncurkan nuklirnya, maka dunia dapat mengalami kerusakan akibat perang



bintang atau perang nuklir, dan dampak yang diterima apabila perang nuklir sampai terjadi, maka bumi akan hancur, mengingat kekuatan bom nuklir tersebut berkali-kali lipat dari kekuatan bom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada masa Perang Dunia Kedua. Lain halnya dengan keamanan tradisional, konsep keamanan dalam pendekatan non tradisional jauh lebih rumit dan komprehensif. Karena tidak hanya ancaman yang bersifat militer, namun ancaman nirmiliter seperti aspek ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, dan juga isu lain seperti demokrasi dan Hak Asasi Manusia. (Perwita, *Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia* 2008) Sebagai contoh terjadinya kebakaran hutan, pencemaran air di laut dikarenakan limbah yang dibuang sembarangan, serta menyebarnya penyakit yang merupakan ancaman yang bersifat nirmiliter namun tetap mengancam *human security* bahkan dapat mengancam keberlangsungan dan eksistensi suatu negara bangsa.

Kemudian, analisa pada dimensi yang ketiga yaitu *changing respond* atau respond yang diambil terhadap ancaman yang muncul. Pada masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin yaitu dilihat dari pendekatan tradisional, respon yang muncul terhadap suatu ancaman tersebut yaitu dengan penggunaan militer atau tindakan kekerasan. Sebagai contoh pada Perang Dingin kedua negara adidaya saling merespon ancaman bagi negaranya yang berbentuk ancaman militer dengan merespon dengan militer juga. Namun lain halnya saat ini, dengan banyaknya isu yang berkembang maka berkembang pula cara atau respon untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada. Tidak hanya penggunaan militer saja, namun telah berkembang menggunakan cara-cara atau pendekatan sosial, budaya, ekonomi, diplomasi, dan pendekatan nirmiliter lainnya. Sebagai contoh, saat ini dunia sedang menghadapi ancaman nirmiliter berupa merebaknya penyakit *Corona Virus Disease 2019* yang dikenal



sebagai Covid 19 sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini. Dengan adanya virus tersebut, tidak hanya melumpuhkan manusia dari segi kesehatan, namun juga dari sisi ekonomi. Sehingga negara-negara di dunia tidak dapat merespon Covid 19 dengan menggunakan senjata militer, namun untuk menangani Covid 19 negara-negara bangsa di dunia perlu bekerjasama untuk membuat vaksin agar dapat mencegah penyebaran korban akibat Covid 19 lebih banyak dan supaya dapat segera memulihkan ekonomi negara.

Selanjutnya analisa dari dimensi *Changing Responsibility of Security* atau pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan pendekatan keamanan tradisional, negara adalah aktor yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan bagi seluruh bangsa dan negaranya. Sedangkan menurut pendekatan keamanan non tradisional, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah, namun tingkat keamanan yang lebih tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. (Perwita, *Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia* 2008) Kemudian dianalisis berdasarkan dimensi yang terakhir yaitu dimensi *Core Values of Security* atau nilai inti dari keamanan itu sendiri. Berdasarkan pendekatan tradisional, keamanan terfokus pada *national independence*, kedaulatan, dan integritas teritorial. Sedangkan pada konsep keamanan non tradisional, terdapat nilai keamanan yang baru yang mana kerap disebut sebagai keamanan non tradisional. Diantaranya yaitu berupa penghormatan pada Hak Asasi Manusia, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan usaha memerangi kejahatan lintas batas atau *transnasional crime* seperti perdagangan manusia, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang seperti NAPZA. (Perwita, *Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia* 2008) Apabila disederhanakan, pergeseran



konsep keamanan tradisional ke keamanan non tradisional dapat dilihat lebih jelas melalui tabel Keamanan berikut. (Praditya 2016)

Tabel 1. Dimensi Keamanan dalam Pandangan Tradisional dan Non Tradisional

DIMENSI KEAMANAN	KEAMANAN TRADISIONAL	KEAMANAN NON TRADISIONAL
<i>The Origin of Threat</i> (Asal ancaman)	Ancaman berasal dari luar (Internasional)	Ancaman berasal dari dalam (domestik) dan luar (Internasional)
<i>The Nature of Threat</i> (Sifat ancaman)	Ancaman bersifat militer	Ancaman bersifat nirmiliter
<i>Changing Response</i> (Respon)	Pendekatan militer	Pendekatan nirmiliter melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial, dan diplomasi
<i>Changing Responsibility of Security</i> (Pihak yang bertanggung jawab)	Negara sebagai aktor tunggal	Aktor keamanan dilihat pada kerjasama individu, organisasi, dan negara pada tataran global
<i>Core Values of Security</i> (Nilai Inti)	Objek keamanan adalah kedaulatan dan teritorial Negara	Objek keamanan adalah penghormatan HAM, lingkungan, kehidupan sosial, dan keamanan insani

4.2 Tantangan Masalah Pengungsi Terhadap Keamanan Nasional Dalam Redefinisi Konsep Keamanan

Fenomena Arab Spring telah memberikan dampak yang cukup besar bagi keamanan internasional. Perjuangan mendirikan negara demokratis di negara yang dipimpin oleh otoriter ini membuat pecahnya konflik di negara mereka. Kejadian ini menyebar diseluruh kawasan Timur Tengah dimana mayoritas di kawasan tersebut dipimpin oleh seorang yang otoriter dan telah menjadi



pemimpin dalam waktu yang lama. Konflik tersebut menciptakan fenomena baru yaitu munculnya gelombang perpindahan manusia secara massal. Perpindahan manusia secara massal yang keluar dari negara asalnya atau tempat tinggal aslinya karena memiliki ketakutan akan diganggu keselamatannya apabila tetap tinggal di negara tersebut disebut sebagai pengungsi. Ketakutan yang mereka alami karena adanya perbedaan atau konflik terkait kesukuan (ras), agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Mereka keluar dari negaranya mencari tempat yang lebih aman dan dapat melindungi keselamatan dirinya. Gelombang pengungsi semakin lama semakin meningkat ketika fenomena Arab Spring semakin menyebar. Negara-negara asal pengungsi tersebut mayoritas berasal dari Timur Tengah, diantaranya dari Suriah, Iran, Irak, Afganistan, Myanmar dan negara lain yang mengalami konflik internal pada negaranya. Negara atau kawasan paling banyak dituju oleh pengungsi tersebut adalah Eropa. Eropa dinilai sebagai tempat tujuan teraman dan dapat memberikan jaminan yang baik bagi pengungsi, mengingat mayoritas negara-negara Uni Eropa meratifikasi Konvensi 1951.

Konvensi 1951 adalah konvensi yang mengatur tentang pengungsi, dimana dalam konvensi tersebut berisikan tentang hak dan jaminan yang diperoleh oleh pengungsi. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut maka wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Konvensi 1951. Di antara hak yang diterima oleh pengungsi yang harus dipatuhi dan harus diberikan oleh negara penerima pengungsi sebagai berikut: (UNHCR 2007)

1. Pasal 31 dimana pengungsi tidak dapat dikenakan hukuman karena masuk secara tidak sah, yang datang dari wilayah dimana dia hidup tidak aman atau kebebasannya terancam



2. Pasal 32 dimana pengungsi berhak untuk tidak diusir kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum
3. Pasal 33 dimana pengungsi berhak untuk tidak dikembalikan dengan cara apapun ke wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau politiknya

Arus gelombang pengungsi yang semakin besar ini tentu tidak hanya mengganggu keamanan negara-negara asal pengungsi, namun juga negara-negara penerima pengungsi tersebut. Meskipun mereka menerima pengungsi tersebut karena telah meratifikasi Konvensi 1951 atas dasar rasa kemanusiaan, namun tidak dapat dipungkiri masalah pengungsi tersebut menjadi ancaman nasional bagi negara-negara tersebut. Mengingat meratifikasi Konvensi 1951 berarti mereka menyetujui untuk memberikan hak-hak yang wajib diberikan kepada pengungsi. Selain tiga hak-hak utama yang telah disebutkan di atas, terdapat juga hak-hak lain seperti hak untuk bekerja, hak mempunyai rumah, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh bantuan umum, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk memperoleh pelayanan hukum, kebebasan bergerak di dalam wilayah negara, dan hak mendapatkan kartu identitas. (UNHCR 2007) Pemberian hak-hak tersebut bukanlah hal yang mudah bagi semua negara, mengingat untuk memberikan hak dan jaminan tersebut tentu membutuhkan banyak pengorbanan, baik dari segi biaya, tempat, tenaga, dan pengorbanan lain yang dilakukan negara penerima. Hal tersebut belum termasuk bagaimana dihadapkan dengan penilaian atau opini masyarakat negara penerima yang kedatangan orang lain dalam jumlah banyak yang memiliki suku, agama, budaya, dan ideologi yang berbeda. Apabila tidak berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait pengungsi ini, maka bisa menjadi *boomerang* bagi negara penerima. Bisa jadi akan munculnya konflik baru di



negara penerima antara penduduk asli dengan pengungsi tersebut sehingga justru menjadi ancaman bagi keamanan nasional negara penerima. Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. (Praditya 2016) Keamanan nasional juga dapat diartikan kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi Negara melalui kekuatan ekonomi, militer, dan politik, serta pengembangan diplomasi. Dalam konsep ini yang ditekankan adalah kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara. (Darmono et al., 2010)

Kedatangan pengungsi dalam jumlah yang besar dapat mengganggu kepentingan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu untuk mengatasi ancaman pengungsi, maka negara perlu membuat kebijakan untuk memelihara, melindungi, dan mempertahankan kepentingan nasional. Negara-negara tujuan pengungsi telah membuat kebijakan nasionalnya masing-masing untuk menghadapi arus gelombang pengungsi yang cukup besar. Di kawasan Eropa terutama di negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional Uni Eropa, mayoritas negara-negara tersebut meratifikasi Konvensi 1951. Bahkan Uni Eropa telah membuat kebijakan *Common European Asylum System (CEAS)* pada yang bertujuan untuk memastikan bahwa para pengungsi menerima hak-haknya dibawah hukum internasional serta mendapatkan standard minimum bersama mengenai perlakuan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap para pengungsi. (ec.europa.eu n.d.) Sistem CEAS ini mengadopsi prinsip-prinsip utama dalam Konvensi 1951 dan menjadi standar acuan kebijakan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap penanganan pengungsi.



Adanya kebijakan terkait penerimaan pengungsi di negara-negara Uni Eropa, membuat arus pengungsi ke kawasan tersebut semakin banyak. Tingginya jumlah pengungsi ke kawasan tersebut mengakibatkan ketegangan antar negara-negara Uni Eropa. Hal ini karena adanya kebijakan terkait pemerataan jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa sesuai kondisi kemakmuran dan ekonomi setiap negara. Bahkan Uni Eropa memberikan sanksi bagi negara yang melanggar kebijakan ini yaitu dengan denda sebesar €250,000 Euro bagi negara yang menolak pengungsi. (European Council 2015) Kebijakan ini memunculkan perbedaan respon dari negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara seperti Jerman, Inggris, Swedia, Austria, dan Inggris tidak keberatan dengan kuota yang diputuskan Uni Eropa. Sedangkan beberapa negara yang lain diantaranya Hungaria, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, dan Polandia menentang kebijakan tersebut. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria Péter Szijjártó menyebutkan bahwa kebijakan tersebut justru tidak solutif dan akan menambah gelombang arus pengungsi ke wilayah Eropa. Sehingga Hungaria kemudian membuat kebijakan untuk membangun pembatas di perbatasan supaya menghindari para pengungsi masuk ke Hungaria secara ilegal. Kemudian penolakan yang dilakukan Perdana Menteri Republik Ceko, Bohuslav Sobotka disampaikannya secara tersirat dan mengkritik atas apa yang dilakukan Jerman yang menerima banyak pengungsi yang justru memancing lebih banyak pengungsi datang ke Eropa. Kemudian penolakan dari Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico terkait kebijakan kuota pengungsi juga muncul akibat trauma terhadap serangan teroris di Paris dan di Jerman yang melibatkan para pencari suaka. (Sugito & Mutia Hariati H. 2017) Penolakan terhadap kebijakan penerapan kuota pengungsi dilatarbelakangi oleh faktor domestik negara-negara tersebut. Faktor domestik ini muncul akibat adanya tuntutan masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut yang disebabkan oleh



persepsi xenophobia¹ dan islamophobia² terhadap para pengungsi yang mayoritas berasal dari Timur Tengah dan beragama Islam. Dikhawatirkan apabila semakin banyak pengungsi yang memasuki negara mereka, konflik dengan warga negara penerima dapat terjadi, sehingga dapat mengganggu keamanan nasional negaranya. Oleh karena itu mereka mengambil sikap penolakan terhadap kebijakan kuota pengungsi tersebut.

Problematika pengungsi ini merupakan salah satu bukti bahwa konsep keamanan tidak hanya persoalan ancaman yang berasal dari militer saja, namun juga dapat berasal dari persoalan non militer. Kemudian aktor utama bukan hanya negara saja, melainkan juga aktor non negara seperti individu, kelompok, NGO, maupun lembaga internasional. Dalam kasus ini adalah ancaman dari problematika pengungsi yang lambat laun menjadi masalah global dan dapat mengganggu keamanan nasional negara lain. Oleh karena itu benar adanya mengenai pergeseran konsep keamanan tradisional ke non tradisional dewasa ini.

10. Kesimpulan

Definisi konsep keamanan mengalami pergeseran. Pergeseran definisi tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendekatan konsep keamanan, yaitu pendekatan keamanan non tradisional dan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ditandai dengan negara sebagai aktor tunggalnya dan militer sebagai sektor utamanya. Sedangkan pendekatan non tradisional menganggap bahwa saat ini aktor keamanan tidak hanya negara saja, namun juga aktor non negara seperti individu maupun kelompok dapat menjadi aktor keamanan. Pergeseran definisi tersebut ditandai dengan berakhirnya Perang

¹ Xeophobia: ketakutan terhadap orang asing

² Islamophobia: ketakutan terhadap orang islam



Dingin. Dengan munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang, maka tidak ada negara lain yang dapat menandingi Amerika Serikat. Sehingga ancaman terhadap negara sudah tidak lagi terfokus pada militer negara lain saja, namun munculnya ancaman baru seperti masalah pengungsi yang dapat mempengaruhi keamanan internasional dan keamanan nasional suatu negara. Oleh karena itu, semua aktor, baik dari pemerintah maupun aktor non negara harus bersama-sama mengatasi persoalan pengungsi yang semakin lama semakin banyak dan menyebabkan munculnya masalah baru di negara lain.

Daftar Pustaka

- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*.
- Barry Buzan & Lenen Hensen. *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2009.
- Buzan, Barry. *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishe, 1991.
- Darmono, B., Wijoko, Toruan, T., & Suharsoyo, J. (2010). Keamanan nasional Sebuah konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. *Dewan Keamanan Nasional*.
- ec.europa.eu. "A Common European Asylum System." ec.europa.eu. n.d. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_en.pdf (accessed 10 31, 2020).
- European Council. "Council Decision (EU) 2015/1523." *Eur-Lex Access to European Union Law*. 09 2015. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011 (accessed 10 31, 2020).
- Graebner, A. Norman. "Introduction: The Source of Postwar Insecurity." In *National Security: Its Theory and Practice 1945-1960*, 23. New York: Oxford University Press,, 1986.
- Mutimer, David. *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies, dalam Contemporary Security and Strategy, Craig A Snyder (ed),*. London: Macmillan Press Ltd, 1999.



- Pasal 1 Konvensi 1951. "Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Refugee (Pengungsi)." n.d.
- Perwita, Anak Agung Banyu. *Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan, 2008.
- . *Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara, dalam Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Propatria, 2006.
- Praditya, Yosua. *Keamanan di Indonesia: Sebuah Kajian Strategis*. Jakarta: Nadi Pustaka, 2016.
- Septa, Albert Alfa. "Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan John Howard: 2001-2007." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 7 No. 2, Mei 2018, 2018: 6.
- Sugito & Mutia Hariati H. *Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Kebijakan Kuota Pengungsi*. Yogyakarta: Laporan Akhir Penelitian Kemitraan Dosen Dengan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- UNHCR. *Penandatangan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan*. Geneva: UNHCR Divisi Perlindungan Internasional,, 2007.



Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional

Budhi Tri Suryanti

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan
Email: trisuryanti31@gmail.com

Abstract

Neo-realist approach towards national security is still applicable even until now. The current changes in strategic environment of the world has just made living as a state even more complex. The ever-changing situation is growing rapidly, and the a certain strategic approaches is needed to fully grasp and deal with the situation. This article aims to describe the neoreailsm approach towards the study of national security. Content analysis method will be used in this article. According to Kenneth Waltz, power is the most important factor in international relations. The competition between states is just a product of the current structure of international system. From more than 20 articles referenced here, it can be summarized that changes in strategic environment is heavily affected by the latest industrial revolution. Thus, from neorealist approach, the security dilemma is even bigger than it was decades ago. New threats and opportunitites come together and raised the bar even higher in modern times.

Keywords: Neo-realism, National Security, security dilemma



6 Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis sebuah negara merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan nasional. Hal ini merupakan hal yang substansial dan perlu dipahami dan ditinjau lebih mendalam karena berkaitan dengan kemampuan sebuah negara untuk mempertahankan dan melestarikan kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan masyarakatnya dari berbagai ancaman. Lingkungan strategis yang fluktuatif menyebabkan kondisi yang sangat kompleks dan tidak dapat dipastikan.

Sebuah pemikiran yang berkembang di era perang dingin dan menjadi salah satu mazhab yang populer sekarang adalah neorealis atau *structural realism*. Mazhab ini menyatakan bahwa kekuatan atau *power* adalah faktor yang paling utama dalam hubungan internasional (Waltz, 1979). Pemikiran kontemporer yang lahir bersamaan dengan *neoliberalism* ini, merupakan salah satu perspektif yang mendominasi teori-teori hubungan internasional.

Pandangan neorealisme ini sendiri lahir dari formulasi ulang pemikiran-pemikiran realis klasik seperti E.H. Carr, Hans Morgenthau dan Reinhold Niebuhr. Sekalipun diformulasikan ulang, neorealisme memiliki akar yang sama bahwa struktur internasional pada hakikatnya merupakan sebuah sistem anarki yang tidak memiliki satu kekuatan supranasional yang jelas yang mengatur negara-negara. Dalam buku *the tragedy of great power politics*, John J. Mearsheimer menyatakan bahwa "*three features of the international system combine to cause states to fear one another: 1) the absence of a central authority that sits above states and can protect them from each other (anarchy), 2) the fact that states always have*



some offensive military capability, and 3) the fact that states can never be certain about other states' intentions" (2014).

Pemikiran neorealisme inilah yang menjadi dasar pemikiran atas kondisi dunia sekarang, yakni sebuah kondisi dilema keamanan (*security dilemma*) yang lahir dari pemikiran orang-orang yang pragmatis. Kondisi dunia yang menggambarkan bahwa suatu negara tidak pernah mampu yakin terhadap kehendak negara lain di masa depan. Kondisi kurangnya kepercayaan atas negara lain yang mengakibatkan negara-negara untuk selalu berjaga atas ancaman-ancaman yang mampu mengganggu kemampuan sebuah negara untuk bertahan hidup.

Dalam mazhab neorealisme sendiri, terdapat dua cabang pemikiran utama yang sekarang menjadi dasar negara-negara untuk menentukan posisi serta langkah-langkah strategisnya, yaitu *defensive realism* dan *offensive realism*. Keduanya memiliki dasar pemikiran yang sama, yaitu struktur sistem yang menyebabkan kompetisi antar-negara, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam melihat cara negara melakukan kewajibannya dalam memenuhi keamanan nasional. *Defensive realism* atau realisme defensif beranggapan bahwa negara berfokus untuk menjaga keamanan nasionalnya sehingga negara sebagai *security maximizers*, sedangkan *offensive realism* atau realisme ofensif berfokus pada akumulasi kekuatan negara, kekuatan-kekuatan relatif yang terakumulasi ini ujungnya akan menghasilkan hegemoni regional bagi sebuah negara.

Kedua pemikiran ini, pada dasarnya berfokus pada keamanan nasional sebuah negara. Dengan kekuatan sebuah negara menjadi sebuah faktor utama, keduanya berusaha untuk menjaga keamanan nasional dari hadapan ketidakpastian di masa depan. Artikel ini akan mengulas lebih jauh tentang pandangan neorealisme terhadap keamanan nasional.



7 Tinjauan Pustaka

7.1 Neorealisme

Teori neo-realisme merupakan teori yang muncul akibat kegagalan realisme klasik menjelaskan mengapa Perang Dingin bisa sampai terjadi. Berbeda dengan realisme yang berpandangan bahwa negara selalu menginginkan *power* atau kekuasaan karena sifat dasar manusia, struktural realisme menyatakan bahwa sistem atau struktur internasional yang mendorong negara untuk meningkatkan *power* nya (Mearsheimer, 2012).

Memiliki asumsi dasar yang sama, neo-realisme juga bersifat pesimis terhadap kerjasama akan tetapi masih ada peluang untuk negara-negara melakukan kerjasama tergantung tingkat kepentingan akan *power* suatu negara. Dalam melihat *power*, realisme dan neo-realisme juga memiliki perbedaan. Realisme menganggap bahwa *power* merupakan tujuan atau tindakan akhir suatu negara yang harus dicapai. Berbeda dengan neorealisme yang menganggap *power* sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara atau kepentingan negara yaitu, keamanan dan kelangsungan hidup negara.

Teori neo-realis melihat negara sebagai *black box*, meskipun adanya perbedaan budaya, ideologi atau konstitusi setiap negara dinilai sama kecuali fakta mengenai negara yang memiliki kapabilitas *power* yang lebih dibandingkan yang lainnya.

Dalam melihat *power*, neo-realis membaginya menjadi dua yaitu, *Defensive* dan *Offensive*. *Defensive* realis seperti Kenneth Waltz, melihat bahwa suatu negara tidak perlu untuk meningkatkan *power* hingga menjadi negara yang hegemon. Berbanding terbalik, *Offensive* realis melihat bahwa negara harus memiliki strategi yang bagus untuk meningkatkan *power* sebanyak-banyaknya sebagai salah satu cara untuk dapat bertahan.



Negara yang memiliki *power* yang tingkatannya lebih tinggi menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Waltz menyatakan bahwa negara-negara akan membangun dan berkoalisi militer untuk menekan negara hegemon atau menyeimbangkan negara hegemon tersebut yang disebut sebagai *balance of power*.

8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan data numerik sebagai sumber data, penelitian kualitatif bergantung pada data naratif seperti kata-kata untuk menggambarkan kompleksitas dari fenomena yang sedang diteliti (Basri 2014). Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memahami fenomena keamanan nasional melalui sudut pandang neo-realisme, dengan bersandar pada studi pustaka terhadap beberapa teks atau naskah yang berhubungan dengan keduanya.

9 Hasil dan Diskusi

Pandangan neo-realisme merupakan sebuah pandangan pragmatis atas dunia. Melihat dunia seperti bagaimana adanya, dan melihat negara-negara sebagai aktor layaknya manusia. Hakikatnya, tidak ada kepastian dalam hubungan internasional. Bentuk-bentuk kerjasama yang seringkali dilihat dewasa ini adalah bentuk dari upaya negara untuk menjaga keamanan nasionalnya, sebagai *balance of power* bagi negara-negara lainnya.

Dari perspektif neorealisme, keamanan nasional sebuah negara selalu dibawah ancaman konstan. Baik dari dalam negara itu sendiri, maupun dari luar negara. Untuk lebih baik melihat keamanan nasional dari perspektif neo-



realisme, penjelasan akan dibagi menjadi dua, *defensive realism* dan *offensive realism*.

Defensive realism seperti Kenneth Waltz, melihat bahwa suatu negara tidak perlu untuk meningkatkan power hingga menjadi negara yang hegemon. *Defensive realism* berpendapat bahwa negara hanya perlu berfokus untuk menjaga keamanan nasionalnya sehingga negara sebagai *security maximizers*. Hal ini dikarenakan *defensive neorealist* menganggap negara perlu meningkatkan pertahanan dan keamanannya. Struktur sistem internasional yang sifatnya anarkis (tidak memiliki sebuah pemerintah/organisasi supranasional di atas pemerintahan sebuah negara). Fokus utama sebuah negara seharusnya tidaklah memaksimalkan *power* tetapi menjaga posisinya di dalam sistem internasional (Waltz, 1979). dengan *balance of power* yang terjadi antar negara, serta struktur sistem internasional yang tidak lagi unipolar (berfokus pada satu *major power*) atau bipolar (berfokus pada dua *major powers*) melainkan multipolar (tidak ada fokus pada satu atau dua *major powers*).

Balance of power ini terjadi karena dengan masing-masing negara yang berfokus dengan keamanan nasionalnya sendiri, tidak ada lagi negara yang secara terbuka berusaha untuk memiliki *power* lebih besar dari yang lain, dan ketika sebuah negara meningkatkan kekuatan negaranya, negara yang lain juga mengikuti sehingga tercipta keseimbangan antara kekuatan dari negara-negara ini.

Defensive realism ini berfokus pada teori Kenneth Waltz tentang *balance of power*, dan dengan asumsi dasar bahwa negara-negara akan saling menyeimbangkan lebih umum daripada kemungkinan negara untuk bersekutu. Hal ini dikarenakan para pemikir realis yang defensif berasumsi bahwa negara yang berusaha mengejar hegemoni dalam sistem internasional akan di *counter*



oleh negara-negara lain yang menjaga *status quo* atas keseimbangan kekuatan negara-negara.

Berbanding terbalik dengan *Offensive realist*, yang melihat bahwa negara harus memiliki strategi yang bagus untuk meningkatkan *power* sebanyak-banyaknya sebagai salah satu cara untuk dapat bertahan. John Mearsheimer adalah salah satu tokoh neorealis yang berupaya untuk memperbaiki bias *status quo* dari pandangan Kenneth Waltz. Bagi realis ofensif, negara-negara bukanlah aktor-aktor yang semata-mata berupaya untuk menjaga posisi di sistem internasional dan lantas mengejar *power* seperlunya, tetapi lebih pada klaim bahwa negara-negara adalah aktor yang mengejar kekuatan, dan menyimpan rencana-rencana agresif di masa depan. Bagi realis ofensif, sistem internasional memberikan manfaat yang besar bagi negara-negara kuat yang bertindak lebih agresif untuk menjaga keamanan nasionalnya dan memastikan kelangsungan hidupnya.

10 Kesimpulan

Pandangan neorealisme terhadap keamanan nasional pada dasarnya berfokus pada adanya *balance of power* antara negara-negara dalam menghadapi *security dilemma* masing-masing. Walaupun dasar pemikiran neorealisme atas tatanan sistem internasional tidak berubah dari pemikiran pendahulunya realisme, namun pemikiran neorealisme telah terbagi menjadi dua sesuai dengan pola perilaku negaranya, baik secara defensif yang mengutamakan keamanan nasional sendiri atau secara agresif yang mengutamakan peningkatan kekuatan dan mengejar hegemoni di areanya.

Pandangan yang pragmatis atas dunia ini merupakan sebuah cara yang masih valid dan logis di masa kini, dengan ketidakpastian pola-pola negara berinteraksi dewasa ini, juga dengan tantangan era digital, menyebabkan



neorealisme masih menjadi salah satu mazhab yang dapat digunakan sebagai kajian keamanan nasional.

Daftar Pustaka

Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*.

Barry Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991).

Barry Buzan & Lenzen Hensen. *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2009.

Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

Darmono, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, Sekretariat Jendral dewan ketahanan Nasional, Jakarta, 2010, hlm 24

David Mutimer, *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd, 1999), 77

Mas'ood, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas studi Sosial UGM.

Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. WW Norton & Company.

Mearsheimer, J. J. (2007). Structural realism. *International relations theories: Discipline and diversity*, 83

Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan A. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.



Perwita, Anak Agung Banyu. *Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara, dalam Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: Propatria, 2006)

Perwita, Anak Agung Banyu. *Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan, 2008

Rudi, T. May. 2002. *Study STRATEGIS: Dalam transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin*

Septa, Albert Alfa. "Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan John Howard: 2001-2007." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 7 No. 2, Mei 2018*.

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Long Grove.



Keamanan dan ancaman cyber bagi sektor privat dan industry militer di era 4.0

Krisna Surya Narindra, S.Pd
k.narindra2001@gmail.com

Abstract

The development of the internet and digital technology is a representation of the 4.0 revolution. The industrial revolution 4.0 shifts the role of humans and industrial machines which characterized the Industrial Revolution that occurred before. The economic policies of these countries to colonialization by Western European countries such as Britain, France and Germany and the United States were also the effects of the industrial revolution. Oil, metals, textiles supporting factories in the industrial revolution 1.0 to 3.0 the entry of these countries to invade, exploring countries that are rich in natural resource potential.

Keyword : Keamanan siber, revolusi industry, ancaman dan keamanan siber, Artificial Inteligent

1. Pendahuluan

Dunia masih pada tahap perkembangan dari revolusi informasi saat ini, dan berdampak pada ekonomi dan politik tidak merata. Perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dari pada perkembangan sector ekonomi. Tiga perempat dari semua komputer digunakan di sektor jasa seperti keuangan dan kesehatan. Peningkatan produktivitas di sector Informasi dan Teknologi ditandai munculnya komunikasi massal dan memberikan beberapa pelajaran tentang kemungkinan efek sosial dan politik hari ini yang mengantar era budaya populer massal.



Manusia dalam era digital saat memiliki ketergantungan terhadap perangkat digital, yang praktis dan massif adalah berupa menyampaikan layanan pengirim berbasis teks, audio dan video yang terintegrasi dalam sebuah aplikasi. Ketergantungan ini membuka celah baru mengenai keamanan cyber baik secara individu maupun secara organisasi maupun entitas di sebuah negara.

Di dunia sering terjadi peretasan terhadap sejumlah situs-situs yang tercatat memiliki keamanan cyber yang mumpuni, di Indonesia pun pernah terjadi peretasan-peretasan pada sejumlah organisasi pemerintahan maupun media massa. Situs-situs yang dibekali keamanan masih saja tembus oleh para peretas dengan berbagai motivasi antara seperti motivasi politik yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Namun ada juga yang meretas sebuah situs dengan motivasi ekonomi seperti yang menyerang perusahaan untuk menuntut sejumlah uang dalam bentuk *bit coin*.

Indonesia dalam kemajuan dunia digital sebatas penonton dan penikmat saja. Partisipasi sebagai kreator aplikasi juga sangat terbatas. Salah satu masalah paling mendesak dalam hubungan internasional kontemporer adalah ekspektasi era baru persaingan strategis yang semakin intensif, yang ditandai dengan pertemuan persaingan politik, ekonomi, dan militer-teknologi dalam konteks pergeseran besar dalam lingkungan keamanan global. Garis depan persaingan strategis yang berkembang ini adalah persaingan untuk supremasi masa depan atas keamanan global dan jaringan kelembagaan ekonomi antara kekuatan militer utama dunia Amerika Serikat, China, dan pada tingkat yang lebih rendah, Rusia. Di Kawasan Asia, kemajuan teknologi masih untuk sementara dikuasai Korea Selatan dan China serikat Kedua negara ini bahkan menjadi ancaman Amerika Serikat dalam dunia industri teknologi informasi dan militer. (Raska, 2020)



Produk digital untuk konsumsi public yang di buat China dan Korea Selatan begitu leluasa dan mendikte selera pasar di dalam industri tehnologi komunikasi. Korea Selatan dan utamanya China bahkan telah mampu membuat sebuah produk pembayaran digital di Indonesia dan teknologi *finger print* yang disematkan dalam gadget terkininya. Kompetisi harga produk China bahkan dapat mematikan produk domestic Indonesia jika penduduk Indonesia beralih dan menggunakan produk jual beli online. Kompetisi harga yang ditawarkan kompetitor China relative lebih murah dibanding produk dalam negeri untuk barang yang sejenis. Sehingga pada akhirnya pemerintah Indonesia melakukan dan menerapkan pajak barang yang dibeli secara online untuk melindungi produk-produk Indonesia.

Dalam konteks perdagangan regional, Indonesia harus segera mencanangkan kemandirian bangsa untuk mengimbangi dominasi Korea Selatan dan China. Kemajuan China diberbagai sector seperti tak terukur dan selalu memunculkan inovasi-inovasi produk secara cepat, massif dan harga yang kompetitif. Keamanan dan stabilitas politik China juga mendukung proses produksi sector barang dan jasa. Pemerintah Indonesia harus banyak membenahi kestabilan politik dan beragam kegaduhan vertical dan horizontal dalam negerinya. Di mata para pemimpin Tiongkok, itu adalah teknologi yang menjadi inti dari kejayaan, kemunduran, dan kebangkitan China.

Pada Abad Pertengahan, China berada dalam peradaban yang sangat maju kala itu di bidang, kompas, bubuk, kertas. Namun ketika batu bara, mesin uap, pabrik, dan listrik telah ditemukan pergeseran teknologi yang menyebabkan kemerosotan kekuatan ekonomi China, dan kemudian kekalahan militer dihampir semua kekaisaran China (Vitori, 2019)



2. Tinjauan Pustaka

Keamanan siber dan kaitan dengan politik keamanan. Jauh dari memberikan jawaban langsung, pertanyaan membuka ruang perdebatan politik dan akademis tentang masalah tersebut. Pertama, keamanan cyber adalah praktik konvensional seputar keamanan jaringan komputer

Kedua, pada kalangan terbatas ahli membahas keamanan dunia maya terutama sebagai masalah manajemen risiko teknis dalam informasi penting perlindungan infrastruktur. Pemerintah dan sector privat dan industri saat ini harus berurusan dengan dunia maya sebagai lapis pertama tantangan utama keamanan nasional. Ketiga, berbanding lurus digitalisasi yang semakin maju dari lebih banyak aspek ekonomi, masyarakat, dan politik, masalah keamanan dunia maya meluas ke kebijakan perluasan domain. Keamanan dunia maya ada disaat yang sama bergerak ke atas dalam agenda politik dan berkembang ke samping sebagai area masalah bagi banyak individu dan korporasi.

Dunia militer erat kaitannya dengan teknologi digital, sejak pertama kali ditemukannya bubuk mesiu perkembangan teknologi militer seakan tidak pernah berhenti dari rangkaian inovasi baik yang berupa hardware maupun software. Keunggulan teknologi militer membuat negara-negara produsen alutsista seperti Amerika Serikat, China dan Rusia dan disusul Korea Selatan menjadi incaran bagi negara-negara non produsen untuk berlomba-lomba memperkuat strategi pertahanannya.

Perang telah memberikan bukti bahwa, teknologi memainkan peran yang penting, misalnya pada perang di era Uni Sovyet dan Amerika Serikat, Sovyet melakukan inovasi yang menakjubkan saat itu dengan mengirim manusia pertama ke luar angkasa dan Amerika Serikat bereaksi dengan mengirim manusia pertama ke bulan delapan tahun kemudian.



3. Metode Penulisan

Penulis menggunakan analisis teks terhadap artikel yang mengangkat tema siber, perkembangan teknologi khskeamanan siber dan ancamannya, serta fenomena-fenomena kejahatan siber yang dialami oleh pribadi maupun oleh industry public maupun militer. Artikel-artikel tersebut dianalisa untuk mendapatkan masalah-masalah dan kemungkinan solusi yang bisa diambil dengan cepat maupun solusi yang bersifat jangka Panjang dan strategis

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Revolusi Industri 1.0, 2.0, 3.0

Revolusi industri 1.0 bercirikan produksi mekanis seperti penambangan batu bara dan penggunaan mesin uap. Tenaga manusia banyak terganti dengan adanya sector-sektor industry berbasis tenaga batu bara. Sehingga target produksi lebih efisien disbanding dengan tenaga manusia. Akibatnya kebijakan Negara pada saat itu adalah memperkuat industri dan memperkaya stok batu bara sebagai cadangan strategis negaranya. Inggris dan Negara Eropa Barat mulai melirik Negara lain yang kaya sumber daya alam dan melakukan ekspansi dan invasi mereka.

Revolusi industri 2.0 bercirikan penggunaan minyak dan listrik sebagai penggerak alat produksi Pabrik-pabrik otomotif mulai bangkit, Negara Eropa benar-benar mulai bangkit tanpa terhalang oleh hambatan dalam bentuk penjajahan sehingga mereka dapat melanjutkan pembangunan yang dmuai pada era industry 1.0. Berbeda dengan bangsa Asia yang justru pad saat itu kaya



dengan sumber daya alam namun masih sibuk dengan kebebasan dan kemerdekaan negerinya. Kebijakan luar negeri Negara-negara industri benar-benar terkonsentrasi untuk

Revolusi industri 3.0 ditandai dengan munculnya kegiatan produksi berbasis elektronik dan teknologi komputer. Tenaga manusia terbantu berkat penemuan mesin dan sangat mendukung produksi dalam volume besar. Selain itu para pemimpin besar negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat semakin gencar memperluas kekuasaan kolonialisme nya, Afrika dikuasai oleh Inggris dan Prancis karena tergiur oleh sumber daya alam yang mereka miliki. Sementara Amerika Selatan hampir semua dikuasai oleh Spanyol dan sebagian kecil oleh Portugal. Era 3.0 merupakan era transisional yang merupakan pertemuan antara era 2.0 yang sedikit "kuno" dan merupakan fondasi teknologi di era 4.0. Dominasi Amerika Serikat dan Eropa Barat masih mewarnai persaingan di era 3.0. Namun, ketergantungan terhadap minyak masih sangat besar dan tidak bisa lepas begitu saja di era ini. Pembicaraan mengenai ancaman ekologi juga mulai dipikirkan oleh aktor negara dalam membuat kebijakan, tentu saja kebijakan yang diambil selalu saja berpihak kepada kepentingan untuk melindungi perekonomian domestik mereka.

4.2 Periodisasi Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 transformasi digital. Revolusi ini sebagian besar dilakukan dengan pengkodean dan algoritma. Industri 4.0 dikaitkan Internet dan jaringan siber. Di era 90 an teknologi komputer melakukan revolusi di bidang aplikasi berbasis DOS, pengolah kata dan data, Word, Lotus dan D Base, namun aplikasi ini belum terintegrasi dan menjadi bagian yang terpisah, sebuah langkah yang praktis dalam membantu pekerjaan. Menjelang tahun 2000



Microsoft Office membuat inovasi yang hasilnya bias dirasakan hingga saat dan belum tergoyahkan meskipun pernah mendapatkan saing dari sebuah pengolah data dan kata yang berifat open source.

China belum mampu menggeser dominasi Microsoft Office dalam hal aplikasi layanan pengolah data dan kata yang tentu saja menjadi pundi-pundi dollar bagi penguasa Microsoft Corporation. China bergerak dibidang lain seperti menggunakan IT sebagai sarana jual beli produk mereka dan membuat sistem pembayaran online yang tentunya Indonesia menjadi pangsa pasar produk mereka dengan memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Sehingga bias dikatakan transformasi digital sebagai prioritas strategis.

Namun China menjadi saat ini masih memimpin dalam sektor jual beli barang melalui penyedia barang terbesar di situs jual beli online. China menawarkan hamper semua barang yang dibutuhkan oleh Indonesia, dengan harga yang kompetitif bahkan lebih murah dalam pembelian kuantitas yang lebih besar. Sehingga Indonesia, dalam hal ini Ditjen Pajak harus membuat regulasi penerapan pajak bagi barang-barang yang dibeli dari China tersebut guna melindungi industry domestic Indonesia.

4.3 Ancaman kemanan siber sebagai Artificial Intelligent

Artificial Intelligent (AI) bertujuan untuk menduplikasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan membangun sistem cerdas. AI juga melibatkan banyak subdisiplin saat ini. Kesulitan dalam kursus pengantar AI terletak pada penyampaian cabang sebanyak mungkin tanpa kehilangan terlalu banyak kedalaman dan presisi. (Wolfgang, 2016). Adopsi dan akselerasi pada tiga dekade terakhir beserta cara teknologi dalam ikut mengubah kehidupan dan



lingkungan bukanlah fenomena baru kemajuan dalam biologi, fisika elektronika dan adopsi massal komputer pribadi. (Skilton, 2016).

Penggunaan internet berkembang dan mempermudah urusan manusia dari sebatas pengolah kata maupun pengolah data. Pengolahan data pribadi dalam sebuah data base merupakan efek dari berkembangnya internet public menjadi sebuah ancaman tersendiri. Fakta-fakta actual mengungkapkan pencurian data-data pribadi yang dilakukan pula oleh kemajuan teknologi internet baik menggunakan digital maupun dengan pencurian data yang dilakukan oleh internal.

Kejahatan peretasan email di tengah pandemic Covid 19 juga menyerang perusahaan penyedia ventilator corona dari Italia dan China oleh warga negara Indonesia yang menyebabkan kerugian 58 miliar. Keamanan email juga mengharuskan pengguna pribadi harus membuat beberapa layer keamanan pribadi. Keamanan secara privat bias dilakukan dengan kewaspadaan pada system password dan update kombinasi password, serta dengan tidak mengklik link-link yang disebar sebagai spam yang dikirim dengan menyebutnya sebagai link give away (hadiah). Keamanan sederhana yang bisa dilakukan oleh individu diantaranya adalah dengan melakukan pemeriksaan keamanan akun email secara rutin menambahkan nomor ponsel dan alamat email pemulihan akun, serta mengaktifkan verifikasi dua langkah (two step verification). Selain itu diyakini dengan pembuat kata sandi yang rumit namun dapat diingat dengan baik dan tidak membagikan akun kepada pihak lain. Pihak privat juga wajib memeriksa device yang terhubung dengan layanan ponsel agar tidak terjadi pencurian data pada setting keamanan dan memastikan penggunaan browsing untuk tidak memilih penyimpanan data dalam computer pribadi maupun public. Kewaspadaan individu masih menjadi kunci utama bagi



keamanan data Individu di Indonesia, dan belum ada satupun korporasi dan insitusi resmi negara yang menjamin keselamatan data individu.

Penggunaan digital money maupun jasa kredit online juga mengharuskan privat, korporasi dan negara membuat system keamanan berlapis Dilaporkan 800 ribu lebih data nasabah Kredit Plus bocor di sebuah forum internet. Data pribadi menjadi peluang bisnis bagi kejahatan di era 4.0 dan peluang bisini bagi sector jasa keamanan siber. Kasus yang keamanan data pribadi masih sangat jarang diketahui oleh awam, tanpa banyak orang menyadari ancaman data bahkan dana sering dating tidak hanya oleh pihak eksternal sebuah korporasi, namun sering kali melibatkan pihak internal perbankan. Contoh kasus adalah pengurangan nominal rekening yang jumlahnya sangat kecil yang dibebankan pada sekian juta nasabah bank tertentu perhari. Hal ini tidak akan menimbulkan kecurigaan terhadap nasabah tersebut, namun secara akumulatif keuntungan yang didapat dari modus ini jumlahnya sangat besar.

Keamanan privat data transaksi online situs jual beli juga mencatat angka fantastis dalam jumlah pencurian data konsumen, setidaknya link tautan untuk mengunduh data Tokopedia sebanyak 91 juta secara bebas. Hal ini menjadi sebuah catatan bagi individu, korporasi dan negara bahwa keamanan data pribadi tak lagi bersifat privat. Negara harus benar-benar membuat sebuah system jaringan yang kuat dan bila perlu mengubah kembali system kodifikasi dalam NIK. Pencurian data harus segera diwaspadai sebagai ancaman nasional karena dari data-data tersebut mampu memunculkan kejahatan Informasi dan Teknologi baru seperti pemalsuan data perbankan guna melakukan transfer kepada nasabah fiktif untuk kepentingan pencucian uang.



Keamanan sector korporasi dalam bidang Informasi dan Teknologi dapat dibedakan menjadi dua sector yaitu korporasi BUMN dan korporasi swasta. Tanpa melakukan dikotomi kedua jenis korporasi tersebut, kedua jenis korporasi tersebut terutama yang menggunakan data pribadi harus memiliki skema keamanan siber yang jelas. Sektor keamanan siber negara menjadi ranah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga ini tidak bekerja pada ranah perlindungan data pribadi karena tugas pokok dan fungsinya. Kemenkominfo menjadi leading sector pengamanan informasi dan menciptakan regulasi yang dapat mengamankan transaksi finansial dan data pribadi pelanggan. Regulasi tersebut dikembangkan secara terintegrasi.

Ranah keamanan siber dimulai dari negara dengan mengembangkan industry teknologi yang mandiri baik berupa hardware mulai dari perangkat satelit mandiri yang benar-benar diproduksi oleh Indonesia, perangkat lunak berupa software, operating system mandiri, Bahasa pemrograman mandiri dan didukung oleh brain ware sebagai pengawas keamanan siber negara yang harus memiliki integritas tinggi dalam melindungi negara, korporasi dan sector privat.

Ketergantungan terhadap produk hardware dan software buatan luar negeri dalam dunia IT memiliki nilai kepraktisan, namun harus disadari juga bahwa vendor produk tersebut tidak serta merta menjual produk aplikasi tanpa menyertakan bug dalam programnya yang bertujuan melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam posisi perang non militer yang bersifat perang teknologi peluang mematikan seluruh komponen jaringan computer yang ada di Indonesia sangat besar. Kendali satelit yang menggerakkan sector komunikasi, sector perbankan dalam keadaan perang teknologi bisa dilumpuhkan jika masih bergantung pada produk luar negeri. Dampaknya akan sangat merugikan Indonesia, kejadian yang pernah terjadi adalah ketika Indonesia



mengalami kerusakan pada jaringan distribusi listrik dimana Indonesia tidak memiliki contingency planing menghadapi kasus yang diklaim sebagai force majeure.

Keamanan korporasi yang rentan terhadap serangan siber sejauh ini masih pada sector perbankan adalah kejahatan skimming. Kejahatan ini sebenarnya termasuk kejahatan perbankan yang tergolong tradisional dimana pelakunya masih menggunakan duplikasi kartu ATM dan mengecoh calon korbannya. Kejahatan yang menyerang korporasi adalah pembekuan situs korporasi yang dilakukan oleh *hacker* tujuannya adalah untuk meminta tebusan sejumlah uang digital, serangan ini lebih dikenal dengan Ransomware. Kasus Ransomware terakhir kali menyerah perusahaan yang justru terkenal dengan system keamanannya, yaitu Garmin. Perusahaan ini sempat diambil alih hampir satu minggu meskipun dalam situs resminya perusahaan ini menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan perbaikan system.

Ancaman siber korporasi di Indonesia memerlukan kolaborasi pengampu kebijakan Informasi dan Teknologi, artinya setiap korporasi harus menggandeng penyedia jasa keamanan siber dibawah naungan pemerintah. Sehingga negara, mampu melakukan pembangunan keamanan siber yang dibutuhkan korporasi dan mewujudkan keamanan tersebut secara berkesinambungan yang dituangka dalam regulasi dan blue print keamanan siber jangka Panjang.

4.4 Ancaman dan keamanan multi layer bagi industry militer.

Saat ini istilah *Defense in Depth (DiD)* mulai dikenal, dimana *Defense in Depth (DiD)* ini merupakan sebuah pendekatan keamanan siber yang melakukan serangkaian mekanisme pertahanan berlapis untuk melindungi



data dan informasi yang berharga. Pada pola ini apabila satu mekanisme gagal untuk membendung sebuah serangan siber pada sebuah instansi, maka diharapkan layer atau lapis berikutnya dapat mulai bertindak untuk menggagalkan serangan dengan rangkaian kegiatan yang lebih efektif.

Pendekatan multi-layer atau pendekatan berlapis-lapis dibentuk dengan keamanan sistem secara keseluruhan dan menangani banyak vektor serangan yang berbeda. Defense in Depth digambarkan atau diilustrasikan sebagai "pendekatan benteng" karena cara kerjanya yang melakukan pertahanan berlapis dari sebuah benteng pada masal lalu di Eropa.

Sebelum musuh dapat menyerang obyek keamanan vital sebuah negara maka musuh siber ini terlebih dahulu dihadapkan pada layer-layer keamanan pada level awal, menengah dan level akhir. Dunia militer yang erat kaitannya dengan penggunaan teknologi digital tidak saja diuntungkan dengan kemajuan digital tersebut namun juga menghadapi sebuah celah potensial untuk diserang, dan pada saat ini terdapat begitu banyak penyerang potensial, dan negara harus menjamin bahwa negara telah memiliki keamanan yang tepat untuk mencegah sistem dan jaringan disusupi. Namun perlu disadari bahwa tidak ada metode tunggal yang berhasil melindungi dari setiap jenis serangan. Penjelasan tersebut membuat negara harus memiliki road map dan pembangunan arsitektur pertahanan mendalam (Defense in Depth)

Pendekatan berlapis untuk keamanan dapat diterapkan ke semua tingkat sistem TI karena tidak ada sebuah negara yang dapat sepenuhnya dilindungi oleh satu lapisan keamanan. Sistem keamanan yang digunakan peretas adalah mencari celah keamanan siber yang ada, karena penguatan di sebuah layer keamanan akan memungkinkan sebuah celah keamanan di lapis yang lain meskipun pada sistem keamanan telah dilengkapi dengan firewall, pemindai malware, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, dan solusi audit integritas, namun



semua itu masih bisa diretas jika terdapat sebuah celah kecil pada system keamanan.

Elemen pertahanan mendalam *Defense in Depth (DiD)* diperlukan dalam dunia militer dan harus terus berinovasi dalam mengembangkan teknologinya misalnya adalah dengan melakukan Kontrol Keamanan Jaringan seperti analisis lalu lintas jaringan. Firewall mencegah akses ke dan dari jaringan yang tidak sah dan akan mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan sekumpulan aturan keamanan. Sistem perlindungan intrusi sering kali bekerja bersama-sama dengan firewall untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan dan meresponsnya dengan cepat.

Amerika Serikat yang dikenal dengan system keamanan pertahanan yang sangat canggih juga masih dapat ditembus oleh para peretas yang bermuatan politis, sebagaimana yang terjadi pada kasus peretasan situs Trumps yang berisi mengenai informasi palsu dari *Federal Bureau of Investigation* (Porter, 2020) yang menyatakan sebuah informasi yang mengklaim memiliki bukti bahwa pemerintah Trump terlibat dalam asal mula virus korona, dan bahwa presiden telah terlibat dengan "aktor asing yang memanipulasi pemilu 2020.

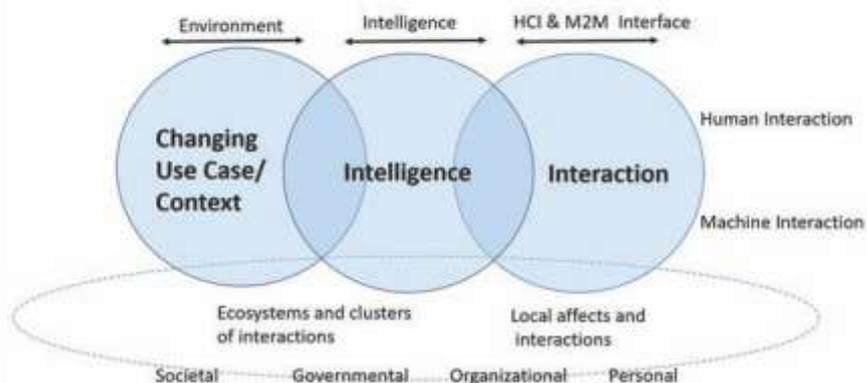
4.5 Persaingan Teknologi Militer dan kebangkitan Artificial Inteligent di era 4.0.

Revolusi digital membawa evolusi sistem yang sangat, persenjataan militer dan perencanaan militer mengalami perubahan besar yang merevolusi konsepsi perang dan pertahanan. Persaingan strategis telah lama ada dari abad 5 SM hingga perpecahan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam Perang Dingin selama paruh kedua abad ke-20. Amerika Serikat hanya berfokus pada memaksimalkan pada menekan Uni Soviet pada ranah politik, ekonomi, ideologis, dan militer. Ketika revolusi industry 4.0 hadir dan menciptakan

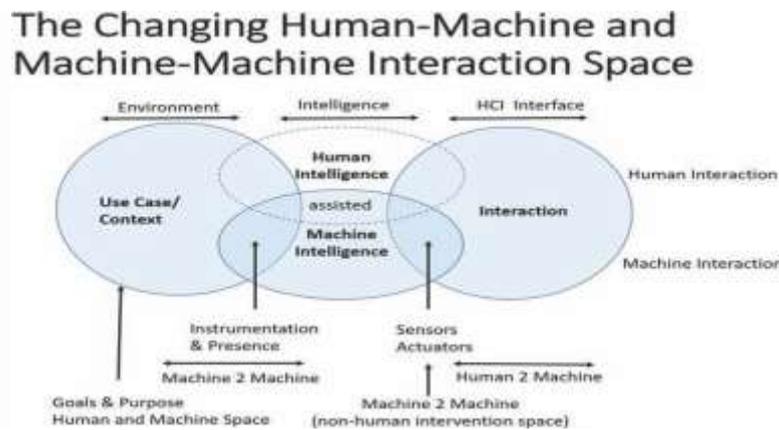
teknologi Artificial Intelligent atau kecerdasan buatan (Artificial Intelligent) membuat perubahan yang signifikan yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. merupakan sebuah manipulasi fisik baru dalam ilmu material dalam nanoteknologi, manipulasi tidak hanya berkembang pada perekaman pembacaan struktur wajah semata namun juga pada hal yang bersifat biologis dalam bioteknologi gen, bedah robotik, prostetik, dan perangkat yang dapat dikenakan semuanya memiliki asal-usul yang dapat ditelusuri kembali melalui beberapa langkah evolusi (Skilton, 2016).

Interaksi sosial dan sosial kini menyatu dalam media sosial dan domain yang terhubung dengan telekomunikasi yang dapat menjangkau, dan dampak negatifnya dapat memecah komunitas sosial dan ekonomi Cloud Systeem atau Big Data generasi informatika dari domain digital, fisik, dan bio-logis memunculkan bentuk-bentuk informasi dan kecerdasan baru tentang lingkungan makro dan mikro tersebut pada tingkat yang otentik. Inilah ciri prinsip dari era industri ke-4 yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Hal ini dapat dilihat proses perubahan social yang diakibatkan oleh adanya penemuan Artificial Intelligent. (Skilton 2016)

4th Industrial revolution impact on interaction



Meskipun demikian perkembangan Teknologi akan mengubah pola interaksi antara produk digital (machine), yang saat ini pola interaksi terjadi antara manusia dan gawai (gadget) menjadi mesin/gawai/produk digital ke mesin/gawai/produk.



Kemajuan teknologi militer berbasis internet menurut Thomas A. Johnson (2018) diantaranya meliputi Cyberspace, Cyber Battle Space Offensive Operations Defensive Operations Intelligence and Counter Intelligence Cyberspace and Cyber Intelligence New Drone Wars. Amerika Serikat yang memiliki hampir kesemuanya itu masih juga menghadapi serangkaian tantangan keamanan saat ini dan jangka panjang di berbagai wilayah geografis, terlebih saat ini hubungan China-AS lebih kompleks dalam hal mengintegrasikan berbagai pendorong kerja sama, persaingan, dan konflik secara bersamaan



termasuk di dalamnya persaingan perangkat berbasis internet dan peralatan berbasis teknologi internet dan pesawat tanpa awak.

Dengan kata lain, pola global dari persaingan strategis di abad ke-21 lebih kompleks, tidak dapat diprediksi, dan beragam, yang mencerminkan berbagai kompetisi di bawah perangkat aturan yang berbeda atau tumpang tindih, hingga persaingan politik-militer-teknologi yang tajam untuk mendapatkan kekuasaan dan status. Amerika Serikat melihat perkembangan teknologi industri militer China dan Rusia akan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memproyeksikan kekuatan di Indo-Pasifik setara dengan Amerika Serikat. China, Rusia, dan Amerika Serikat berusaha untuk mencapai atau memperpanjang margin keunggulan teknologi militer mereka dalam persaingan strategis untuk teknologi canggih yang muncul seperti kecerdasan buatan (*Artificial Inteligent*), robotika, manufaktur aditif. Teknologi digital yang muncul seperti *Defense in Depth (DiD)* secara luas dianggap sebagai elemen penting dari efektivitas dan keuntungan militer di masa depan. *Artificial Inteligent* merupakan sebuah jalan menuju sistem senjata otonom dimana peralatan tempur, mesin, dan perangkat lunak dapat melakukan tugas tanpa campur tangan manusia. Sistem otonom adalah sebuah rancangan mesin yang dapat berjalan secara otomatis.

Kemampuan negara dalam penguasaan teknologi militer yang mutakhir akan berbanding lurus dengan sistem persenjataan yang lebih efektif, yang membawa dampak pada pembangunan kekuatan militer yang lebih besar, sehingga dampak menyusun kekuatan geopolitik yang lebih besar pula. Penemuan teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal kecepatan pemrosesan informasi, otomatisasi untuk platform senjata dan sistem pengawasan, serta pengambilan keputusan daya tembak yang lebih presisi.



Kemajuan teknologi dalam dunia militer yang dapat dikembangkan adalah penggunaan *Artificial Intelligent* yang dapat menganalisa secara real-time serangan siber canggih dan deteksi citra penipuan hingga mengarahkan platform otonom seperti drone, hingga bentuk komando dan kontrol baru seperti sistem manajemen pertempuran otomatis yang menganalisis data besar dan memberikan rekomendasi untuk tindakan manusia.

Teknologi *Artificial Intelligent* dapat dikembangkan sebagai teknologi pertahanan strategis, seperti peringatan dini, pertahanan rudal dan pencegahan nuklir dan kecerdasan buatan bisa dikembangkan sebagai aplikasi dalam system informasi dan sistem komando strategis (Command and Control) komunikasi, navigasi, intelijen dan pengawasan serta dalam seluruh area kemampuan pertahanan dan serangan siber. *Artificial Intelligent* akan memiliki implikasi yang mendalam tentang bagaimana militer mengadopsi teknologi baru; bagaimana pada tingkat operasional, militer beradaptasi dan menerapkan teknologi baru, dan pemahaman kita tentang ruang pertempuran di masa depan yang mengedepankan kemajuan teknologi dan informasi. Evolusi dinamis yang menjadikan perangkat lunak akan semakin mampu menghasilkan program komputer secara otomatis yang membuat kecerdasan buatan mungkin bisa mencapai dan bahkan melebihi kinerja kognitif otak manusia. Namun, teknologi dan kemampuan yang dihasilkan jarang menyebar secara merata di seluruh garis geopolitik.

China, Rusia, dan Amerika Serikat, dan Korea Selatan saat ini masih mendominasi penguasaan berbasis *Artificial Intelligent* kemajuan teknologi industri, informasi dan digital ternyata relevan dengan teknologi militernya dan akan menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi dan diklasifikasikan bagi negara lainnya. Kemajuan teknologi, terutama di bidang sistem militer, merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, inovasi dan dampak terhadap



efektivitas militer dan keunggulan komparatif bisa jadi signifikan dan sulit diprediksi pada tahap permulaannya. Teknologi canggih banyak digunakan pada sektor komersial, dan hal ini mendorong kemajuan pada sektor industri militer, menawarkan peluang baru dan berpotensi signifikan untuk aplikasi pertahanan guna meningkatkan keunggulan militer kepada negara lain. Kini teknologi militer hadir pada era “Revolusi Industri Keempat” (*4IR Four Industrial Revolution*) di bidang-bidang yang dapat dilihat pada kehadiran-kehadiran teknologi China, Amerika Serikat, Rusia dan Korea Selatan.

Perception, Processing, Cognition	Performance and Materials	Communication, Navigation and Targeting
• Cloud Computing	• Quantum Computing	• Precision Position, Navigation and Timing
• Big Data Analytics	• Autonomy	• Directed Energy
• Artificial Intelligence	• Novel / Smart / BioMaterials	• Electro-Magnetic Weapons
• Cyber capabilities	• Meta-technologies	• Cyber Capabilities
• Virtual and Augmented Reality	• Composites for Aerospace	• Unmanned Systems
• Robotics / Unmanned Systems	• Internet of things	• Hypersonics
• Advanced Sensors	• Energy capture and storage	• Optical satellite links
• Internet of things		• Visible light communication

Kemajuan teknologi digital militer yang tidak merata secara alami memengaruhi bagaimana teknologi dan kemampuan ini dapat memengaruhi keamanan dan stabilitas kawasan. Bagaimana dengan negara yang belum memilikipersenjataan dengan teknologi yang kuat? Pilihannya adalah dengan melakukan aliansi dengan melakukan hubungan melalui berbagi teknologi dan keharusan interoperabilitas, sementara konsep strategis tradisional seperti pencegahan dapat diuji melalui munculnya berbagai jenis konflik yang dibawa oleh teknologi baru. Negara harus memapu menilai kemampuan relatif militer regional untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi kritis baru dan yang



muncul, kemungkinan kemajuan mereka dalam melakukannya, dan hambatan yang mungkin mereka hadapi, pada akhirnya dengan memperhatikan bagaimana hal itu akan mempengaruhi keuntungan dan kerugian dalam kemampuan militer regional.

Persaingan strategis yang berkembang dan persaingan untuk supremasi masa depan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China membentuk perspektif yang berbeda terhadap terobosan teknologi. Diperlukan sebuah konsep kerangka kerja komparatif untuk inovasi pertahanan yang mengintegrasikan berbagai tahapan, jalur, dan pola. Pertama-tama, mengkonseptualisasikan teknologi yang muncul ke dalam kemampuan militer melibatkan proses internal inovasi militer serta proses perbandingan eksternal adaptasi atau persaingan. Inovasi militer yang mengganggu mungkin tidak selalu membutuhkan terobosan teknologi, doktrinal, dan organisasi secara simultan, tetapi dapat menjangkau spektrum. antara modernisasi inkremental dan transformasi terputus-putus. Berdasarkan asumsi ini, seseorang dapat melakukan triangulasi lintasan inovasi pertahanan di sepanjang tiga komponen yaitu: jalur konseptual yang meliputi persaingan, adaptasi, dan inovasi, kemudian pola teknologi seperti spekulasi, eksperimen, dan implementasi serta perubahan organisasi, eksplorasi, modernisasi dan transformasi.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan Lembaga yang perlu menilik 4 kekuatan besar penguasaan teknologi digital dan teknologi informasi. Indonesia Pada abad ke-21, China, Rusia, Amerika Serikat dan Korea Selatan saat ini masih dalam tahap pengembangan, akuisisi, penyebaran, dan penerapan teknologi baru sebagai sarana untuk menciptakan keuntungan dan memengaruhi actor-aktor negara atau pilihan strategis pesaing mereka

Terdapat ada empat strategi bersaing yang berbeda tetapi saling mendukung: (1) strategi penolakan; (2) strategi pembebanan biaya; (3)



menyerang strategi pesaing; dan (4) menyerang sistem politik pesaing. Strategi penolakan berusaha untuk mencegah lawan mencapai tujuan politik dengan menunjukkan kemampuan teknologi militer, strategi yang membebankan biaya yang bertujuan untuk meyakinkan pesaing bahwa biaya tersebut sangat murah, pendekatan ketiga, menyerang strategi pesaing, berusaha mempersempit opsi strategis pesaing menjadi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri. Strategi yang menyerang sistem politik pesaing berusaha mengeksploitasi faksi subversif dalam sistem itu.

Teknologi digital baru akan juga masuk ke bidang militer dan kebijakan keamanan.

4.6 Negara sebagai dalam menghadapi ancaman dan tantangan keamanan siber.

Dalam melindungi dari ancaman siber Indonesia memiliki Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang memiliki tugas seperti : Melindungi jaringan infrastruktur Strategis Pemerintah, Data Nasional, Data Pribadi, Data Penduduk, dan Data Industri , Memajukan dan Menumbuhkan Ekonomi Digital, Meningkatkan Daya Saing dan Inovasi siber, Mencerdaskan dan Membangun karakter SDMBangsa Indonesia dalam ruang siber. (Asep Chaerudin 2019). Adanya tugas tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang wajib untuk memberikan perlindungan dalam keamanan data personalnya dari penyalahgunaan oleh pihak yang ingin memanfaatkan data karena latar belakang ekonomi maupun tindakan criminal lainnya, seperti pembuatan identitas diri palsu, identitas perbankan, identitas internasional seperti passport

Masih menurutnya, bahwa ada 5 prinsip dasar yang harus disiapkan negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan siber seperti dalam diagram di bawah ini :



Negara telah membuat regulasi dan system yang tersusun dengan rapi penanganan data identitas melalui satu pintu sehingga pengawasan keamanannya lebih mudah. Ini merupakan system yang dapat dibangun dengan mudah dibanding dengan menciptakan sebuah jaringan makro yang meliputi pembangunan mandiri, brain ware dan software hasil rancang bangun domestik. Elemen individu dan badan atau perusahaan yang menjadi objek yang merupakan obyek vital, harus mendapatkan payung hukum terhadap insiden pencurian data sehingga terdapat kepastian hukum untuk dapat dengan mudah melaporkan dan mendapatkan solusi jika mendapatkan kerugian atas identitas diri yang dipakai. Regulasi negara ini lah yang menjadi layer berikutnya selain pada pengamanan secara fisik atas serangan siber yang terjadi.



Perang yang nyata saat ini adalah perang siber baik dalam kapasitas hacker melawan Lembaga negara dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun perang siber yang menyerang perusahaan maupun individu. Ketahanan siber publik, *siber resilience*, merupakan bagian dari keamanan siber negara. Barometer terhadap keberhasilan melawan serangan siber yang menyerang sector privat dan korporasi seharusnya berbanding lurus dengan keberhasilan negara dalam mengatasi serangan siber kepada institusi negara.

Ancaman dalam bidang siber juga hanya bersifat melindungi data pribadi, korporasi dan insititusi militer dari serangan siber baik dari dalam maupun dari luar, namun juga ancaman siber adalah ketika negara tidak dapat melakukan tindakan preventif dengan mempersiapkan secara dini individu-individu yang tak hanya cakap dalam operasi melawan siber, namun perlunya individu yang mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam membuat perangkat pertempuran siber. Perangkat tersebut dapat berupa pengembangan alutsista modern yang mandiri dan tangguh. Terutama dalam pembuatan software, teknologi *Artificial Inteligent* yang menggunakan bahasa (developing program) yang dibuat sendiri.

4. Kesimpulan

Kemajuan teknologi sebagai dampak revolusi industry 4.0 membawa dampak positif dan negative yang dirasakan oleh individu maupun korporasi. Selain mempermudah transaksi elektronik dan mempesingkat jarak dan waktu, perkembangan teknologi dalam bidang siber membawa ancaman tersendiri. Bagi individu ancaman pencurian data dan penipuan daring sering dirasakan akibat lemahnya lapis pengamanan siber yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Individu juga belum merasakan hadirnya problem solving



yang legal kasus pencurian tersebut. Negara harus mempermudah layanan pengaduan dengan menggunakan teknologi yang ada yang dapat diunduh dengan mudah jika seseorang maupun perusahaan merasa dirugikan akibat serangan siber dengan segera melakukan upaya penelusuran digital.

Negara mempersiapkan dan mengenalkan teknologi *Artificial Intelligent* khususnya pada ranah pertahanan dengan langkah transfer of technology, menyiapkan Pendidikan yang mendukung terciptanya teknologi berbasis *Artificial Intelligent* yang dapat diterapkan pada bidang-bidang militer seperti Intelijen, operasional, territorial, dan territorial mengingat pertempuran yang terjadi di masa yang akan datang merupakan pertempuran berbasis teknologi sehingga negara yang memiliki kemajuan teknologi dalam bidang militer secara teori akan lebih mudah memenangkan pertempuran.

Daftar Pustaka

- Cahiers Vilfredo Pareto, (2006) *La révolution industrielle à l'échelle de l'histoire humaine de la biosphère*
- Frederich Ebert Stuftung, (2015) *Les nouvelles technologies militaires numériques et les systèmes d'armes autonomes*
- Joseph S. Nye Jr, (2004). *Power in the Global Information Age*.
- Jon Porter, (2020) *Trump's campaign website hit with cryptocurrency scam*.
- Jean-Marc Vittori, (2019) *Pourquoi la guerre du XXIe siècle sera technologique*.



Marsda TNI Asep Chaerudin, M.A.S.S., Strategi Keamanan Siber

Mark Skliton and Felix Hovsepian (2016), The 4th Revolution Industry

Michael Raska, (2020) Strategic Competition for Emerging Military
Technologies: Comparative Paths and Patterns – Analysis.

Myriam Dunn Cavelty & Andreas Wenger, (2019) Cyber security meets security
politics: Complex technology, fragmented politics, and networked science.

Jean-Marc Vittori, (2019) Pourquoi la guerre du XXI^e siècle sera technologique.

Redaksi, (2019) <https://jurnalsecurity.com/rubrik/cyber-security/>

Thomas A. Johnson, 2015, Cyber-security Protecting Critical Infrastructures
from Cyber Attack and Cyber Warfare

Wolfgang Ertel, (2016), An Introductory to Artificial Intelligence,